

**PERILAKU POLITIK MASYARAKAT GAMPONG RIMBA RAYA
DALAM MENENTUKAN PILIHAN POLITIK
PADA PILKADA 2017 DI KABUPATEN
BENER MERIAH**

SKRIPSI

OLEH:

**MARZUKI EFENDI
NIM. 150801097**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2022

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marzuki Efendi

NIM : 150801097

Program Studi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Universitas : UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat mempertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-RANiry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Desember 2022

Yang Menyatakan



Marzuki Efendi
NIM. 150801097

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai
Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Dalam Ilmu Politik

Diajukan Oleh

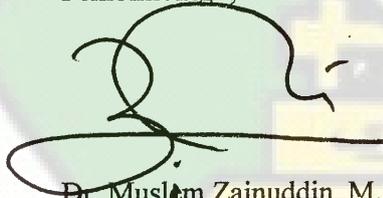
MARZUKI EFENDI

NIM. 150801097

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh

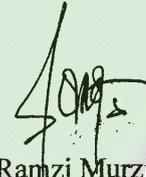
Ace under delay
8/12 2022

Pembimbing I,



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP. 196610231994021001

Pembimbing II,



Ramzi Murziqin, M.A
NIP. 198605132019031006

**Perilaku Politik Masyarakat Gampong Rimba Raya Dalam
Menentukan Pilihan Politik Pada Pilkada 2017 Di Kabupaten Bener
Meriah**

SKRIPSI

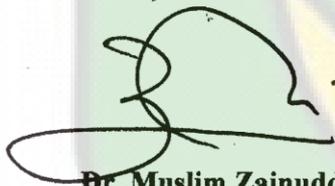
Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 21 Desember 2022

Banda Aceh

Panitian Ujian Munaqasyah Skripsi

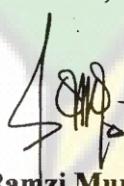
Ketua,



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si

Nip. 196610231994021001

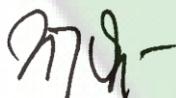
Sekretaris,



Ramzi Murziqin, S.H.I, M.A.

Nip. 198605132019031006

Penguji I,



Eka Januar, M.Soc, Sc.

Nip. 198401012015031003

Penguji II,



Arif Akbar, M.A.

NIDN. 2024109101

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulja, S.AG., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan suatu tindakan untuk meluangkannya sebagai warga negara dalam memilih pemimpin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku masyarakat Bener Meriah khususnya pada Gampong Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo serta hal-hal yang mempengaruhi perilaku politik pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah periode 2017-2022. Objek penelitian ini adalah masyarakat Gampong Rimba yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Proses pemilihan kepala daerah yang telah berlangsung di Kabupaten Bener Meriah khususnya Gampong Rimba Raya, memberikan kesan bahwa masih banyak masyarakat yang belum betul-betul memahami makna dari pemilihan itu sendiri, beberapa diantaranya menganggap pemilihan hal yang biasa-biasa saja. Ada pula masyarakat yang memilih hanya karena adanya ikatan kekerabatan dan lain sebagainya. Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh, apakah ada pengaruh antara perilaku politik dengan pilihan politik masyarakat. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 973 orang, agar lebih spesifik peneliti mengambil 90 orang sebagai sampel dari penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode ini digunakan untuk meneliti hubungan diantara variabel-variabel penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan perilaku politik masyarakat Gampong Rimba Raya 60% masih cenderung didasari oleh faktor-faktor yang bersifat tradisional dan ikatan-ikatan emosional seperti adanya hubungan kekerabatan, faktor lingkungan, ekonomi dan budaya politik.

Kata Kunci: *Perilaku Politik, Politik, Pemilu dan Masyarakat.*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “ Perilaku Politik Masyarakat Gampong Rimba Raya Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pilkada 2017 Di Kabupaten Bener Meriah”. Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjaa S-1 pada Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahn UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tidak lupa pula shalawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Peneliti menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai pihak skripsi ini tidakakan terselesakan oleh karena itu peneliti ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu sepenuh hati,baik berupa ide, semangat, doa,bantuan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penghargaan yang tinggi dan ucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang tidak henti-hentinya peneliti ucapkan terima kasih kepada kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Sukardi Ibunda Maisarah yang telah merawat dan membesakan serta mendidik peneliti dengan penuh Kasih saying dan kesabaran.

Izinkan peneliti menyampaikan penghargaan yang tulus dn ucapkan terimakasih yang mendalam juga kepada pihak-pihak yan telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK, MA, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Muji Mulia, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Selaku Ketua Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
4. Rasa Hormat dan terimakasih yang tidak dapat peneliti ucapkan hanya dengan kata –kata kepada Dr. Muslim Zainuddin, M.Si dan Ramzi Murziqin, S.H.I, M.A, Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu tenaga, ide-ide saran motivasi dalam membimbing dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan
6. Kepada informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan kesediaannya.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, hanya kepada Allah SWT peneliti serahkan semua kebaikannya. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, peneliti mengharapkan masukan dan saran – saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini. Demikian peneliti sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacany, dan akhir kata dengan kerendahan hati, peneliti ucapkan terimakasih banyak yang telah membantu penelitian skripsi ini

Banda Aceh, 8 Desember 2022
Penulis,

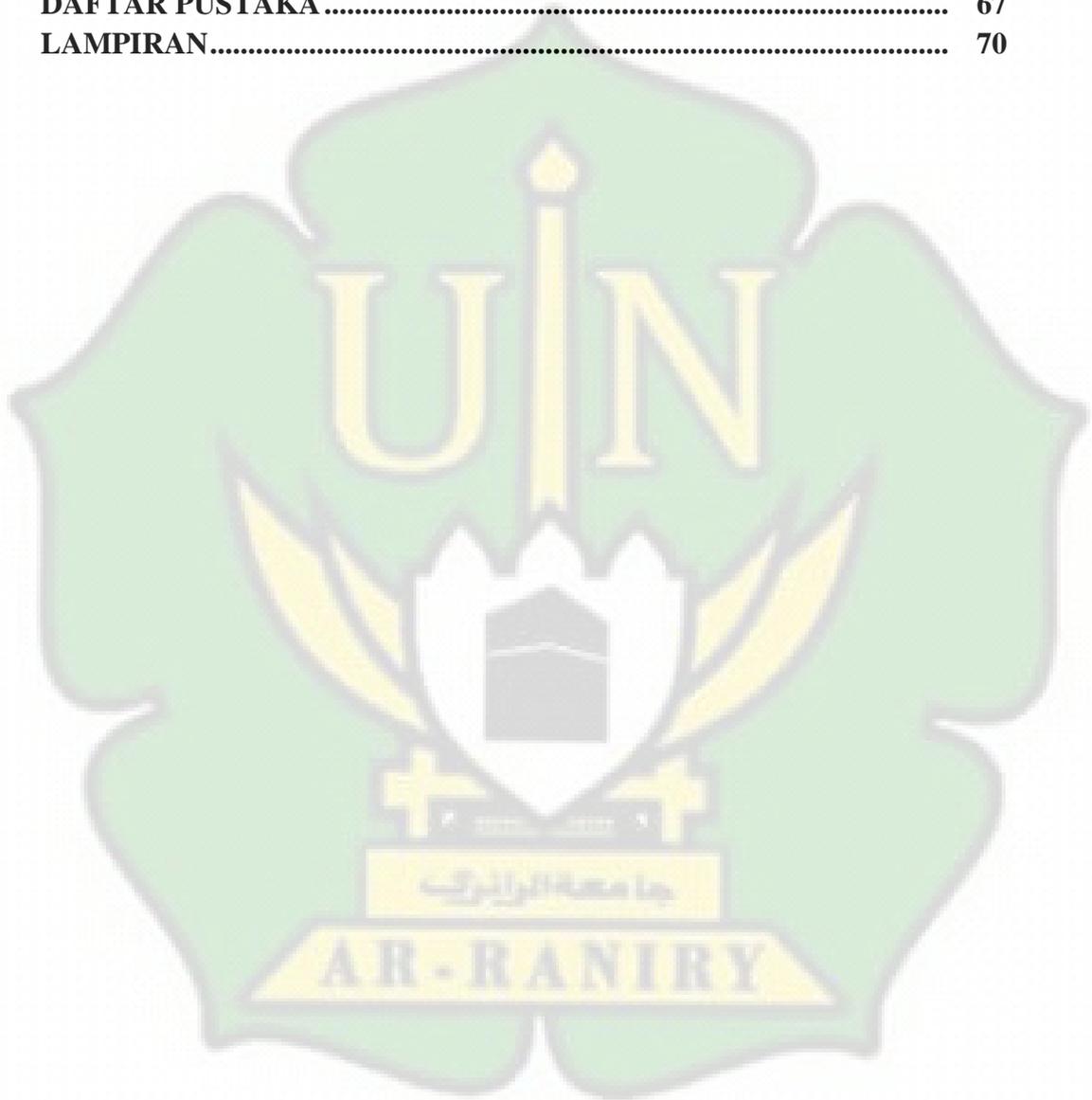
Marzuki Efendi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Pengertian Perilaku Politik	14
2.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Politik.....	21
2.3 Perilaku Pemilih.....	22
2.3.1 Definisi	22
2.3.2 Pendekatan dalam Perilaku Pemilih	23
2.4 Pengertian Politik.....	32
2.4.1 Pengertian Budaya Politik	34
2.4.2 Ciri-ciri budaya politik.....	34
2.4.3 Faktor penyebab perkembangan Politik di suatu daerah	35
2.4.4 Karakteristik pemilih	37

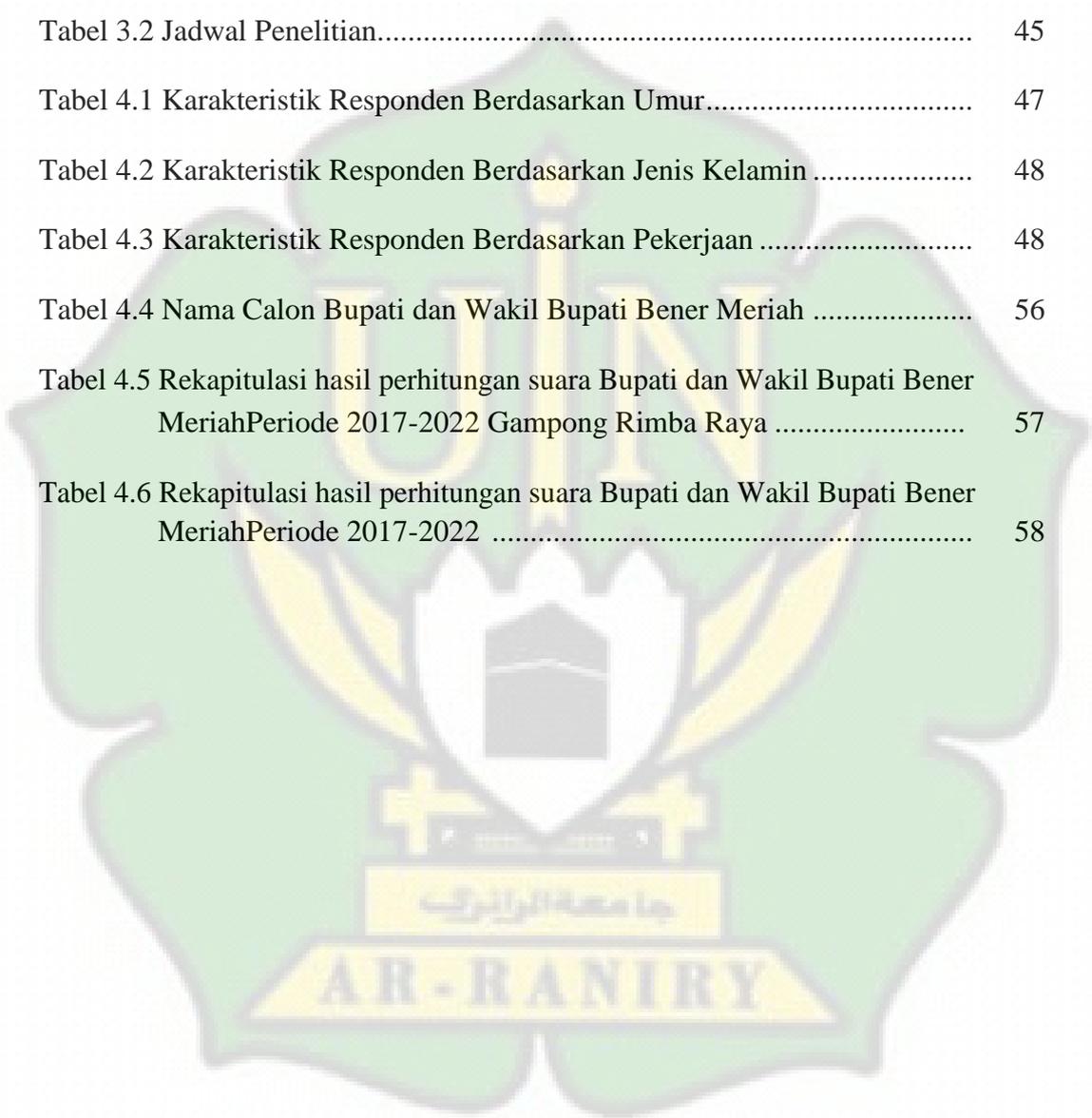
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Lokasi Penelitian Penelitian	39
3.2 Pendekatan Penelitian	39
3.3 Jenis Penelitian.....	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data	41
3.5 Populasi dan Sampel	42
3.6 Teknik Analisa Data	44
3.7 Jadwal Penelitian	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Hasil Penelitian	46
4.1.1 Gambaran Umum Gampong Rimba Raya	46
4.2 Penyajian Data	47
4.2.1 Karakteristik Responden.....	47
4.2.2 Tanggapan Responden.....	49
4.3 Hasil Pilkada Kabupaten Bener Meriah.....	56
4.3.1 Nama – Nama Calon Bupati dan Calon Wakil	
Bupati Kabupaten Bener Meriah Periode 2017-2022	56
4.3.2 Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Calon Wakil	
Bupati Kabupaten Bener Meriah Periode 2017-2022	57
4.4 Pembahasan	59
4.4.1 Perilaku Politik Masyarakat Gampong Rimba Raya	59
4.4.2 Hal-Hal Yang Mempengaruhi Perilaku Politik	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sebaran Populasi Berdasarkan Jenis Kelamin	43
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	45
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	47
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	48
Tabel 4.4 Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah	56
Tabel 4.5 Rekapitulasi hasil perhitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Periode 2017-2022 Gampong Rimba Raya	57
Tabel 4.6 Rekapitulasi hasil perhitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Periode 2017-2022	58



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, artinya negara kita memberikan kebebasan berbicara dan berpendapat serta kebebasan berserikat kepada setiap warga negara Indonesia. Secara sederhana, demokrasi dapat di artikan sebagai pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi salah satunya dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang menjadikan rakyat mampu membatasi kekuasaan pemerintah, hal ini dikarenakan setiap pemilih dapat menikmati kebebasan yang dimilikinya tanpa intimidasi dan kecurangan yang membuat kebebasan pemilih terganggu. Sebuah demokrasi yang baik seharusnya tidak hanya berkaitan dengan prosedur dan isi, melainkan juga berkaitan dengan hasil dari prosedur dan isi di dalam demokrasi itu sendiri.¹

Pemilihan umum adalah ruang bagi masyarakat untuk memilih wakil masyarakat. Pemilu hakikatnya sebuah proses sekaligus sarana demokratis untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Pemilu juga merupakan proses sirkulasi elit yang bersifat inklusif di mana seluruh warga masyarakat secara terbuka memiliki kesempatan untuk memilih dan dipilih. Melalui proses ini, masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan beragam harapan dan berbagai kepentingan melalui pilihan-pilihan politik yang disalurkan dalam pemilu. Dalam

¹ Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010)

tataran idealitas normatif, bahkan melalui mekanisme pemilu inilah masyarakat menentukan pilihan haluan kehidupan bernegara secara paripurna. Karena itulah dalam konteks pemilu, masyarakat sebagai pemilih memiliki urgensi tersendiri.²

Dalam sistem pemilu terdapat partisipasi warga negara yang mana warga negara tersebut berperan aktif dalam melakukan pemilihan. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, juga merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum, dalam masyarakat yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, maka keterlibatan warga negara dalam memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan pendapatnya dalam proses-proses politik.³

Partisipasi politik ialah sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik yang dimaksud ialah partisipasi para pemilih yang ikut serta memberikan hak suaranya di pemilihan kepala daerah.⁴

Pada terminologi sosiologi politik, dianggap jika lebih banyak masyarakat turut serta berpartisipasi dalam politik menunjukkan bahwa pendidikan politik masyarakat telah berhasil. Oleh sebab itu, semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, maka pelaksanaan demokrasi semakin baik. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat yang mengikuti

² Yalvema Miaz, (2012), *Partisipasi Politik; Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*, Padang: UNP Press

³ Anas Sudijono. 1995. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

⁴ *Ibid*

dan memahami masalah politik serta ingin melibatkan diri mereka dalam berbagai kegiatan politik.⁵

Jika tingkat partisipasi politik masyarakat rendah, maka ada indikasi bahwa pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan di suatu negara memberi tanda yang kurang baik. Indikasi tersebut bahwa masyarakat kurang berminat untuk masalah-masalah pemilu dan ketatanegaraan lainnya. Menurut Cohen dan Uphoff, bentuk-bentuk partisipasi politik yaitu:

- a. Partisipasi dalam pembuatan keputusan
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
- d. Partisipasi dalam evaluasi⁶

Bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut⁷:

- a. Partisipasi dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka
- b. Partisipasi dalam bentuk iuran uang, barang, dan prasarana
- c. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan
- d. Partisipasi dalam bentuk dukungan

Partisipasi politik masyarakat tak lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berproses. Sistem kepolitikan bangsa Indonesia hingga saat ini telah mengalami perubahan, mulai dari orde baru sampai pada reformasi. Disadari bahwa reformasi sering dimaknai sebagai era yang lebih demokratis. Sebagai proses dari transformasi politik, makna pilkada juga merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin berfungsinya

⁵ Yalvema, 2012, *Op. Cit*

⁶ Yalvema, 2012, *Loc. Cit*

⁷ Sastropoetro, S. 1995. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Penerbit Alumni

mekanisme check and balance di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat.

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam mengatur pemerintahan sendiri terutama dalam hal Pemilu dan Pemilukada. Undang-undang ini sesuai Pasal 22E UUD 1945 yaitu bahwa Pemilihan Kepala Daerah baik untuk tingkatan Gubernur, Bupati, Walikota serta para wakilnya di tentukan oleh adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁸

Dalam hubungan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu Pemilihan umum misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki referensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada referensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing.

Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik yaitu adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul, Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28

⁸ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menegaskan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 56 jo pasal 119 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang pilkada langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu calon pasangan yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.⁹

Dalam negara demokrasi, konsep partisipasi politik yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat untuk menetapkan tujuan masa depan dan menetapkan calon pemimpin negara. Pemilih dalam pemilu akan memilih partai yang dianggap mampu mewakili suara dan aspirasi mereka. Semakin banyak pemilih yang memilih suatu partai maka terbuka luas peluang partai tersebut untuk menang. Alat ukur untuk mengetahui partisipasi, demokratisasi, dan legitimasi warga negara Indonesia dapat dilihat melalui perilaku politiknya. Perilaku politik tersebut dapat dilihat dari berbagai jenis yakni melalui aktivitas dan antusiasme masyarakat untuk datang kelokasi pencoblosan dalam pemilihan umum. Bentuk perilaku politik ini menjadi alat analisis untuk melihat partisipasi politik

⁹ *Ibid*

masyarakat itu sendiri. Termasuk di dalamnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 yang lalu.

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih pada saat memberikan suaranya tanpa ada paksaan dan intimidasi dari pihak manapun, kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Seiring perkembangan era reformasi seperti sekarang berkembang pula sebuah yang dinamakan asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Sejak di berlakukannya Otonomi Daerah membawa dampak yang sangat luas terhadap berkembangnya demokrasi di Indonesia serta membawa harapan besar untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran daerah dengan pemilihan

kepala daerah secara langsung. Rakyat bisa menentukan pilihannya sendiri dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini membawa perubahan pandangan masyarakat terhadap pemerintahan, karena calon yang akan memimpin dipilih langsung oleh rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung membuktikan adanya sikap demokratis dan ketransparanan bagi rakyat yang akan memilih seorang pemimpin secara terbuka. Bagaimanapun ini merupakan konsekuensi logis dari berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1947 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 rakyat berharap dapat mengetahui dan memahami isi yang terkandung dalam undang-undang, sehingga lebih dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan politik atau pendidikan politik yang lebih dewasa terutama lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah.

Pada tahun 2004, perilaku pemilih sudah mengalami perubahan. Antusiasme pemilih terlibat di dalam pemilu jauh berkurang. Walaupun terlibat, tidak lepas dari transaksi-transaksi material. Tidak sedikit para pemilih datang ketempat-tempat kampanye karena memperoleh imbalan kaus atau „uang transportasi“. Kecenderungan demikian semakin kuat ditemui pada pilkada-pilkada yang dilakukan sejak 1 Juni 2005. Transaksi model demikian menghasilkan relasi antara wakil dan terwakil secara terputus, karena transaksi

itu selesai ketika (calon) wakil memberikan „materi“ dan terwakil menentukan pilihannya.¹⁰

Sehubungan dengan kondisi rakyat yang sebahagian berada dalam kondisi serba keterbelakangan dan ketidaktahuan politik, serta didukung pula oleh sikap apatisme masyarakat terhadap politik, kemudian untuk merangsang partisipasi politik mereka secara aktif, perlu adanya pendidikan politik di alam demokrasi yang terbuka dengan adanya otonomi dan pemilihan kepala daerah secara langsung dewasa ini, membawa dampak positif bagi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan membangun tingkat kesadaran dalam berpolitik, serta masyarakat lebih kreatif dalam memilih calon Kepala Daerah yang mempunyai pemikiran yang ingin membangun daerahnya untuk maju dan sejahtera serta pelayanan publik yang lebih baik.

Sebagaimana kita ketahui bahwa, setiap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah penyelenggaranya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BAB IV bagian kedelapan pasal 57 (1,2) yang berbunyi :

1. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kepada DPRD.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan simpulkan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis tetapi masih kentalnya keterlibatan

¹⁰ Kacung Marijan, (2010) *Op. Cit*

partai dalam menentukan dan mengendalikan pemilihan kepala daerah, secara pemilihan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil bahwa pemilihan kepala daerah benar-benar bersifat murni dan konsekuen dimana setiap pasangan calon tersebut diajukan oleh partai politik. Harapan positif dari partai politik adalah optimalisasi fungsi dan peran partai politik itu sendiri dalam membawa masyarakat menuju kearah yang lebih baik dan sejahtera serta demokratis.

Begitu pula pada pelaksanaan pemilukada di Gampong Rimba Raya yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 lalu, masih belum berjalan dengan baik. Sebab sebahagian masyarakat masih bersikap apatis terhadap pelaksanaan pemilukada. Sikap apatis ini bukan tanpa alasan, masyarakat pada umumnya telah jenuh terhadap fenomena-fenomena silih bergantinya pemimpin yang menurut mereka semata-mata hanyalah perebutan kekuasaan untuk kepentingan elit politik itu sendiri. Terlebih, ketidakpercayaan masyarakat juga semakin tinggi karena setiap kali diadakannya perebutan kursi kepemimpinan, mereka selalu saja disuguhkan dengan adanya janji-janji yang membuat masyarakat percaya dan yakin terhadap calon.

Fenomena demikian semakin meyakinkan masyarakat bahwa setiap kali diadakannya pemilihan pemimpin seperti pemilukada dan pemilu-pemilu lainnya, masyarakat hanya dijadikan sebuah alat untuk mengantarkan kandidat untuk menggapai ambisi kekuasaannya. Setelah mendapatkan kekuasaan itu, sebagaimana sebuah alat yang sudah terpakai fungsinya, maka akan dibuang begitu saja karena sudah hilang nilai manfaatnya. Demikian halnya anggapan

masyarakat, Setelah pemilihan berakhir, maka mereka akan terlupakan begitu saja.

Pada saat peneliti melakukan observasi di Gampong Rimba Raya, masih terlihat perilaku masyarakat dalam memilih pemimpin dan keterlibatannya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Gampong Rimba Raya, memberikan kesan bahwa pilihan rasional masyarakat dalam memilih pemimpinnya cenderung dikesampingkan. Mereka yang pada saat mencoblos, meski memilih secara sadar pilihannya, akan tetapi masih didasarkan pada pertimbangan yang bersifat subjektif emosional, memilih hanya karena masih adanya ikatan kekeluargaan, kekerabatan, persahabatan dan sebagainya. Keadaan masyarakat yang demikian peneliti ketahui dari beberapa masyarakat yang memberikan informasi langsung.

Hal tersebut disebabkan karena faktor etnisitas, ataupun kekerabatan yang masih amat kental pada perilaku masyarakat, sehingga keberadaan pemimpin masyarakat dengan model perilaku memilih tersebut, dapat menghambat proses demokratisasi. Sehingga, jika hal tersebut diarahkan untuk kepentingan politik kekuasaan tertentu, maka hal tersebut menjadi kekuatan politik yang besar. Namun tidak semua masyarakat merasakan hal tersebut, masih ada juga masyarakat yang berfikir positif terhadap pelaksanaan pilukada. Semua tergantung individu, mau terus-terusan dimanfaatkan atau maju dan ikut berpartisipasi melalui pilukada dengan hati dan pikiran yang positif demi mewujudkan negara yang adil dan sejahtera. Berdasarkan Uraian tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan mengangkat judul “Perilaku Politik

Masyarakat Gampong Rimba Raya Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pilkada 2017 di Bener Meriah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Perilaku politik masyarakat Gampong Rimba Raya dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah periode 2017-2022?
2. Apa saja yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat Gampong Rimba Raya dalam menentukan pilihan pada proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku masyarakat Kabupaten Bener Meriah khususnya pada Gampong Rimba Raya dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022.
2. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang mempengaruhi perilaku politik dalam penentuan pilihan politik.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun maksud yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan serta menambah referensi karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan.

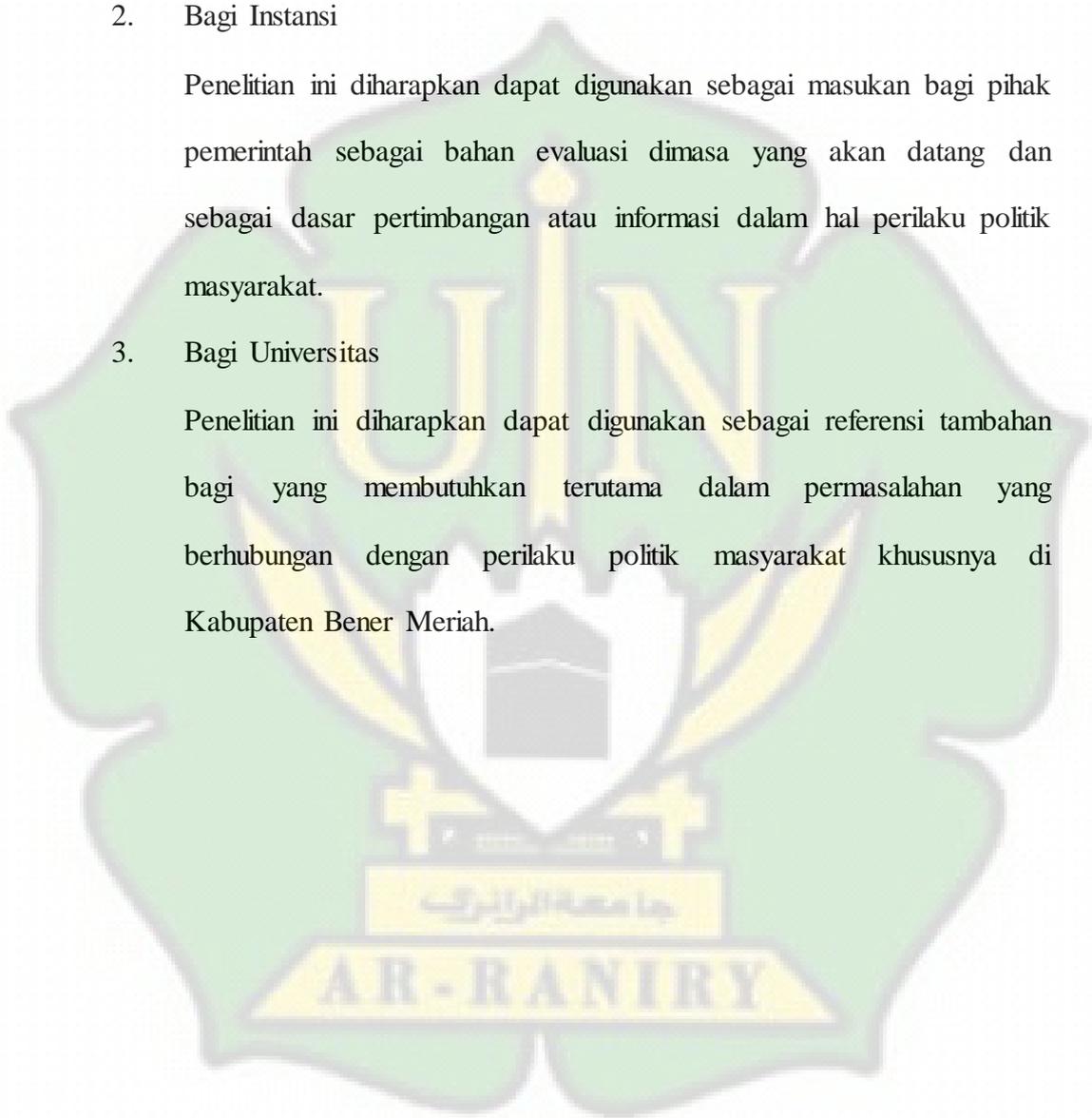
Penelitian ini juga merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori dengan mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut sehingga akan menjadi lebih lengkap.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak pemerintah sebagai bahan evaluasi dimasa yang akan datang dan sebagai dasar pertimbangan atau informasi dalam hal perilaku politik masyarakat.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi yang membutuhkan terutama dalam permasalahan yang berhubungan dengan perilaku politik masyarakat khususnya di Kabupaten Bener Meriah.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh lembaga maupun individu yaitu:

1. Penelitian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang

Pada pemilukada 1999, ada perubahan radikal terhadap karakter dan perilaku pemilih. Keikutsertaan pemilih dalam pemilukada 1999 sebagai pemilih bercorak sukarela. Di mana terjadi keterlibatan yang intens dari pemilih selama proses pemilukada. Hal ini tidak lepas dari euforia reformasi yang masih dirasakan masyarakat serta harapan yang besar terhadap perubahan.¹¹

Pemilukada 2004 menunjukkan perilaku pemilih yang berbeda. Antusiasme pemilih mulai menurun dan perilakunya sudah mulai bercorak rasional. Bahkan menurut Marijan (2010) sudah tergolong rasional pragmatis dengan melakukan praktik-praktik transaksional (jual beli suara) di mana pemilih mulai menghitung imbalan dari suara yang diberikan. Perilaku ini tidak lepas dari penilaian bahwa wakil-wakil rakyat hasil pemilu 1999 yang mereka harapkan ternyata tak mampu berbuat banyak dan tidak memberikan perubahan berarti. Kalaupun ada, yang memperoleh keuntungan dari perubahan itu adalah wakil srakyat itu sendiri.

¹¹ Kacung Marijan, (2010). *Op. Cit*

2. LSI (Lembaga Survei Indonesia)

Pada Pemilu langsung, dalam analisis LSI preferensi pemilih dalam menentukan pilihannya lebih beragam. Selain rasionalitas pragmatis, muncul juga semangat kedaerahan, etnisitas, agama dan kelompok. Survei LSI tahun 2008 yang dilakukan di sejumlah daerah, yaitu Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Bangka Belitung, menyimpulkan bahwa faktor Etnis dan Agama masih menjadi pertimbangan utama bagi pemilih dalam menentukan pilihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pemilih ini adalah sudut kajian yang menarik dalam konteks pemilihan langsung.

Selama ini kajian terhadap pemilih seperti yang dilakukan oleh Afan Gaffar, Liddle dan Mujani (LSI), Malaranggeng, Ananta dkk, adalah kajian dalam perspektif kuantitatif yang melihat kecenderungan pemilih dari hitungan statistik, agregasi angka-angka dan kecenderungan-kecenderungan kelompok. Hal ini menurut hemat penulis belum dapat menyelami lebih dalam apa yang dipikirkan oleh pemilih ketika ikut berpartisipasi dan menentukan pilihannya terhadap calon yang ada.

2.2 Pengertian Perilaku Politik

Kajian menyangkut perilaku merupakan pendekatan yang muncul setelah adanya Perang Dunia II. Pendekatan ini dipengaruhi oleh studi ilmu sosiologi dan psikologi. Salah satu corak pemikiran pokok dari pendekatan perilaku adalah menyangkut perilaku politik, atau kekuasaan, atau keyakinan politik.

Budiharjo (2008) Perilaku Politik memiliki beragam definisi atau pemaknaan. Lasswell dalam Varma memberikan penjelasan bahwa perilaku politik yaitu: “Pertama, perilaku politik selalu memiliki orientasi pada suatu nilai dalam proses politik yang berlangsung yang merupakan satu bagian. Kedua, perilaku politik bertujuan menjangkau masa depan, bersifat mengantisipasi, berhubungan dengan masa lampau, dan senantiasa mempertahankan kejadian masa lampau.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa perilaku politik memiliki orientasi yang meliputi dimensi nilai dan dimensi waktu. Selain itu, dalam perilaku politik menunjukkan harapan-harapan individu atau kelompok yang hendak dicapai, dimensi nilai menunjukkan suatu hal baik yang bersifat abstrak atau konkret yang dilaksanakan dan diperebutkan. Sementara dimensi waktu mengacu pada adanya relasi secara langsung antara perilaku politik dengan latar belakang perilaku politik sebelumnya dan perilaku politik yang akan datang.

Secara sederhana, perilaku politik dapat dipandang sebagai sebuah pikiran dan tindakan seseorang yang berkaitan dengan proses politik. Lebih lanjut, menurut Sastroatmojo mendefinisikan perilaku politik secara lebih rinci yakni sebagai berikut: “Perilaku politik merupakan salah satu aspek dari perilaku secara umum karena di samping perilaku politik masih ada perilaku lain seperti perilaku ekonomi, perilaku budaya, perilaku keagamaan dan sebagainya. Perilaku politik merupakan perilaku yang menyangkut persoalan politik. Perilaku politik berkenaan dengan tujuan berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai tujuan, serta sistem kekuasaan yang

memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat ke arah pencapaian tujuan tersebut yakni tujuan masyarakat secara umum.”¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, meskipun pada dasarnya perilaku politik merupakan bagian dari perilaku secara umum, akan tetapi perilaku politik tentunya berbeda dengan perilaku lainnya seperti dalam konteks ekonomi, keagamaan, budaya; dan bentuk perilaku lainnya. Karena pada dasarnya perilaku politik selain terkait dengan urusan kekuasaan yang mana dapat memiliki otoritas tertentu untuk mengatur kehidupan masyarakat dan juga terkait dengan upaya untuk mencapai tujuan masyarakat secara umum. Lebih lanjut dapat dipahami secara menyeluruh bahwa perilaku politik adalah proses-proses atau kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik.

Perilaku merupakan sifat alamiah manusia yang membedakannya atas manusia lain, dan menjadi ciri khas individu atas individu yang lain. Dalam konteks politik, perilaku dikategorikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik. Pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, berfikir, bersikap, dan lain sebagainya yang merupakan refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun nonfisik. Perilaku juga diartikan sebagai suatu

¹² Sastroatmojo, (1995), *Op. Cit*

reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya, reaksi yang dimaksud digolongkan menjadi 2, yakni dalam bentuk pasif (tanpa tindakan nyata atau konkrit), dan dalam bentuk aktif (dengan tindakan konkrit), sedangkan dalam pengertian umum perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup.¹³

Menurut Ensiklopedi Amerika, perilaku diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya, hal ini berarti bahwa perilaku baru akan terwujud bila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan, dengan demikian maka suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan perilaku tertentu pula. Kushartono menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dipelajari.¹⁴ Di tengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi, sebagian dari perilaku dan interaksi dapat ditandai akan berupa perilaku politik, yaitu perilaku yang bersangkutan paut dengan proses politik. Sebagian lainnya berupa perilaku ekonomi, keluarga, agama, dan budaya. Termasuk kedalam kategori ekonomi, yakni kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, menjual dan membeli barang dan jasa, mengkonsumsi barang dan jasa, menukar, menanam, dan menspekulasikan modal. Namun, hendaklah diketahui pula tidak semua individu ataupun kelompok masyarakat mengerjakan kegiatan politik.

Memilih ialah suatu aktifitas yang merupakan proses menentukan sesuatu yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok,

¹³ Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta

¹⁴ Kushartono, B dan Iriani, N. 2005. Silase Tanaman Jagung sebagai Pengembangan Sumber Pakan Ternak. Di dalam: Prosiding Temu Teknis Nasional Tenaga Fungsional Pertanian Balai Penelitian Ternak. Bogor.

baik yang bersifat eksklusif maupun yang inklusif. Memilih merupakan aktifitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung.

Menilai perilaku memilih ialah keikutsertaan Warga Negara dalam pilkada merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pilkada tersebut. Perilaku pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal perilaku politik merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya, sedangkan secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Misalnya saja isu-isu dan kebijakan politik, tetapi pula sekelompok orang yang memilih kandidat karena dianggap representasi dari agama atau keyakinannya, sementara kelompok lainnya memilih kandidat politik tertentu karena dianggap representasi dari kelas sosialnya bahkan ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur tertentu. Sehingga yang paling mendasar dalam mempengaruhi perilaku pemilih antara lain pengaruh elit, identifikasi kepartaian sistem sosial, media massa dan aliran politik.

Pemilu sebagai medium pilihan publik seyogyanya mengkondisikan seluruh pihak yang terlibat untuk belajar berbagi peran sehingga tidak semuanya harus berpusat pada salah satu aktor atau salah satu lokus (pusat) .

¹⁵Seiring dengan konstalasi politik di era reformasi penguatan demokrasi yang legitimate sebagai harapan dari ending transisi demokrasi, semakin dapat

¹⁵ Ahmad Nadir, 2005, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, Malang.

dirasakan oleh masyarakat melalui pelaksanaan pemilihan kepala daerah/pilkada secara langsung.

Sebagai konsekuensi logis dari perubahan atmosfer politik tersebut, maka dinamika dan intensitas artikulasi politik pun makin tampak ditengah ranah kehidupan sosial politik. Secara khusus perubahan yang terjadi dalam sistem pemilu kepala daerah, yakni dari sistem pengangkatan langsung oleh pejabat pusat, kemudian menjadi sistem pemilihan perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang senantiasa mengandung kultur vested interest (kepentingan pribadi) di kalangan elit, dan akhirnya menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, pemilu kepala daerah secara langsung merupakan indikator pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis.¹⁶

Para ilmuwan politik kontemporer berpandangan bahwa perilaku politik berarti suatu kegiatan yang berkenaan dengan proses dan pelaksanaan keputusan politik dan yang melakukan kegiatan tersebut ialah pemerintah dan masyarakat. warga negara memang tidak memiliki fungsi menjalankan pemerintahan, tetapi mereka memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang menjalankan fungsi pemerintahan. Salah satu wujud dari perilaku sosial dalam kehidupan masyarakat adalah perilaku politik sebagai perilaku yang bersangkutan paut dengan proses politik, untuk membedakannya dari perilaku ekonomi, keluarga, agama dan budaya. Sedangkan politik adalah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan

¹⁶ Ambo Upe, Tradisi Aliran dalam Sosiologi (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010)

pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah. Secara lebih rinci Popkin membedakan antara pilihan politik sebagai wujud perilaku politik dengan pilihan pribadi terhadap produk-produk konsumtif sebagaimana dalam perilaku ekonomi. Menurutnya ada empat hal yang membedakan perilaku tersebut. Pertama, memilih kandidat politik tidak langsung dirasakan manfaatnya sebagaimana pilihan terhadap pilihan konsumtif, melainkan manfaatnya diperoleh di masa depan. Kedua, pilihan politik merupakan tindakan kolektif di mana kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Jadi pilihan seseorang senantiasa mempertimbangkan pilihan orang lain. Ketiga, pilihan politik senantiasa diperhadapkan dengan ketidakpastian utamanya politisi untuk memenuhi janji politiknya. Keempat, pilihan politik membutuhkan informasi yang intensif demi tercapainya manfaat di masa depan.

Dari beberapa karakteristik tentang perilaku memilih tersebut, yang tentunya akan berimplikasi dalam pemberian suara pada proses pemilihan kepala daerah (pemilukada). Memberikan suara adalah salah satu tindakan sosial dalam proses pemilihan Kepala Daerah, di mana pemilih banyak menggunakan pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan putusan mereka dengan pemberian suara melalui pemilihan kepala daerah (Pemilukada) secara langsung. Pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beranekaragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

2.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Politik

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik pemilih adalah:

17

1. Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, ekonomi, sistem kebudayaan media massa.
2. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian masyarakat seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan.
3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
4. Faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi masyarakat secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan seperti, cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok dan ancaman dengan segala bentuknya.
5. Faktor sosial ekonomi, meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan jumlah keluarga.
6. Budaya, Nilai budaya politik atau civic culture merupakan basis yang membentuk demokrasi, menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.

Perilaku politik suatu masyarakat juga bisa dipengaruhi oleh adanya unsur-unsur kekuasaan. Seorang pemimpin sebagai pemilik kekuasaan bisa mempengaruhi, bahkan menciptakan dan menggiring pengikut, menjadi provokator pengikut, sehingga para pengikut dapat mempengaruhi pemimpin

¹⁷ Hidayat, Syarifudin; dan Sedarmayanti. (2002). Metodologi Penelitian. Bandung : Mandar Maju

yang diinginkan. Sebaliknya “seorang pengikut dapat mempengaruhi pemimpin, bisa memberikan bisikan, dan menyuruh untuk mempertahankan kekuasaan dan bahkan bisa menjatuhkan kekuasaannya.

2.3 Perilaku Pemilih

2.3.1 Definisi

Perilaku pemilih secara sederhana dapat dimakanai sebagai tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau cocok. Perilaku pemilih dapat dikaitkan dengan adanya proses pemilihan umum di suatu negara atau daerah tertentu. Sementara untuk lebih jelasnya, Surbakti mendefinisikan perilaku pemilih sebagai: “aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilihan umum (pilkada secara langsung). Bila *voters* memutuskan untuk memilih (*to vote*) maka *voters* akan memilih atau mendukung kandidat tertentu”.¹⁸

Pendapat di atas, semakin memperjelas bahwa perilaku pemilih sangat erat kaitannya dengan proses pemilihan umum, karena berkaitan dengan sikap memilih atau tidak memilih seseorang. Adapun. Beberapa bentuk atau jenis perilaku pemilih yang dimaksud yakni dapat meliputi kegiatan pemilih pada saat proses kampanye, keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam partai politik dan partisipasi masyarakat dalam proses pemungutan suara atau apabila dalam konteks Indonesia disebut pemilihan umum. Berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 2015 tentang Pemilu, menyatakan bahwa pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau

¹⁸ Anas Sudijono. 1995, *Op. Cit*

sudah pernah kawin. Sehingga dalam kontes pemilihan umum di Indonesia, pemilih haruslah WNI dan berusia 17 tahun keatas.¹⁹

Dalam proses perilaku pemilih individu atau seseorang, suatu perilaku pemilih dapat dapat merujuk pada adanya persepsi positif dan negatif. Hal ini merujuk pada pendapat berikut: “Apabila suatu persepsi positif, maka pemilih cenderung melakukan pemilihan dalam konteks presiden atau partai yang sedang berkuasa, sebaliknya apabila persepsinya negatif, maka pemilih akan lebih cenderung melakukan pilihan terhadap calon presiden atau partai yang dianggap sebagai oposisi.”²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses memilih, seorang pemilih cenderung dapat diklasifikasikan sebagai pemilih yang memiliki persepsi positif dengan memilih presiden atau partai politik yang sedang berkuasa, sementara bagi pemilih yang memiliki persepsi negatif memiliki keenderungan untuk memilih opsi lain yakni memilih pihak yang menjadi oposisi. Secara garis besar, perilaku pemilih memiliki beberapa model pendekatan yang meliputi model sosiologis, model psikologis, dan model pilihan rasional atau model ekonomi-politik. Oleh karena itu, berikut ini akan diuraikan masing-masing asumsi dan faktor yang ditawarkan dari ketiga model tersebut.²¹

2.3.2 Pendekatan dalam Perilaku Pemilih

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis dalam kajian perilaku pemilih dikenal juga dengan istilah madzab Columbia yang mulai muncul sekitar tahun

¹⁹ Undang-Undang No 7 tahun 2015 tentang Pemilu

²⁰ Hariyanto. 2014. Asessmen Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

²¹ Yustiningrum, RR Emilia dan Wawan Ichwanuddin. (2015). Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Pada pemilu 2014. Jurnal Penelitian Politik. Volume 12 No. 1 Juni 2015

1940an. Pendekatan ini secara sederhana dapat dipahami sebagai pendekatan yang memilihat suatu kegiatan memilih individu atau kelompok yang memiliki kaitannya dengan konteks sosial. Lebih jelasnya, Hutomo menjelaskan bahwa: “pendekatan sosiologis dalam menjelaskan perilaku Memilih adalah masyarakat dalam menetapkan pilihannya saat pemilihan umum banyak dipengaruhi faktor prinsip-prinsip kesamaan karakter sosiologis, maksud dari faktor prinsip kesamaan sosiologis ini terbagi menjadi dalam beberapa hal yang dalam penjelasan nanti banyak disebutkan dan dituliskan dalam beberapa literatur.”²²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa menjelaskan kecenderungan memilih seseorang sangat dipengaruhi oleh kesamaan sosiologis. Selain itu, pendekatan ini memiliki asumsi dasar bahwa setiap individu pastinya terikat dengan lingkungan sosialnya baik itu lingkungan keluarga, pekerjaan, tempat tinggal, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan tiap individu tersebut didorong untuk menyesuaikan dirinya dengan perilaku lingkungan sosialnya. Selain itu, pendapat lain juga menjelaskan bahwa “Menurut pendekatan ini, memilih sebenarnya bukan sepenuhnya merupakan pengalaman pribadi, melainkan suatu pengalaman kelompok.”²³

²² Hutomo, R. R. (2015). Perilaku Memilih Warga Surabaya Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Hubungan Kesuaian Program Kandidat , Kampanye , Identifikasi Partai dan Pemberian Imbalan Uang dalam Menentukan Pilihan Partai Politik dalam Pemilu Legislatif 2014). Jurnal Politik Muda,

²³ RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin (2015). Partisipasi Politik dan perilaku Memilih Pada Pemilu 2014. Jurnal Penelitian Politik, Volume 12 No. 1 Juni 2015,

Perilaku memilih seseorang cenderung mengikuti arah predisposisi politik lingkungan sosial dimana ia berada. Dari berbagai ikatan sosial yang ada di tengah masyarakat, banyak sarjana ilmu politik biasanya menunjuk tiga faktor utama sebagai indeks paling awal dari pendekatan ini yaitu: status sosial-ekonomi, agama, dan daerah tempat tinggal.”²⁴

Penejelasan tersebut menyatakan bahwa sejatinya, pemilih tidaklah independen dalam melakukan pilihan, karena pada dasarnya lingkungan sosialnya telah secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pemilih. Bahkan pengaruh tersebut terkadang dapat cenderung memaksa. Tiga faktor dalam dalam perspektif ini yakni status sosial-ekonomi, agama, dan daerah tempat tinggal. Sehingga pemilih pada akhirnya mampu terpengaruh dikarenakan tekanan tersebut. Disamping itu, ada juga yang menyertakan beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi pilihan pemilih.

Beberapa faktor dalam memberikan pengaruh pada perilaku pemilih secara sosiologis yang mana meliputi: “faktor kelas sosial, yang meliputi pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan; agama dan tingkat religiusitas; ras, etnik, atau sentimen kedaerahan; domisili, yaitu antara perdesaan dan perkotaan; jenis kelamin; dan usia sebagai faktor-faktor sosiologis yang dianggap mempengaruhi pilihan pemilih dalam pemilu.”²⁵

²⁴ Hutomo, R. R. (2015). *Op. Cit*

²⁵ Hutomo, R. R. (2015) *Op. Cit*

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui secara rinci bahwa ada peran kelas sosial yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam pendekatan sosiologis. Hal ini dikarenakan kelas sosial juga mengacu pada konteks lingkungan sosial pemilih. Selain itu, faktor kelas sosial ini juga tidak hanya mengacu pada latar belakang sosial seseorang saja, namun juga menyangkut kemampuan seseorang di bidang ekonomi seperti pekerjaan dan tingkat pendapatan.

Menurut pendekatan ini, memilih sebenarnya bukan sepenuhnya merupakan pengalaman pribadi, melainkan suatu pengalaman kelompok. Perilaku memilih seseorang cenderung mengikuti arah predisposisi politik lingkungan sosial dimana ia berada.

b. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologi secara sederhana dapat dipahami bahwa perilaku pemilih seseorang dipengaruhi oleh adanya interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal individu. Pendekatan ini menjelaskan menyangkut bagaimana sikap dan harapan masyarakat dapat membentuk tindakan serta tingkah laku dalam proses pemilihan umum. Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku pemilih. Variabel-variabel itu tidak dapat dihubungkan dengan perilaku memilih kalau ada proses sosialisasi. Oleh karena itu, menurut pendekatan ini, sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku memilih (politik) seseorang. Oleh karena itu, pilihan seorang anak yang telah melalui tahap sosialisasi politik ini tidak jarang memilih partai

yang sama dengan pilihan orang tuanya. Menurut psikologi dapat menjelaskan mengapa seseorang memiliki pilihan tertentu yang dapat dijelaskan oleh tiga fungsi sikap.

Fungsi sikap pertama adalah fungsi kepentingan, dimana tiap pilihan yang dipilih oleh setiap orang didasarkan untuk pemenuhan kepentingannya secara pribadi. Fungsi sikap kedua adalah fungsi adaptasi, bahwa dalam setiap pilihan yang ia ambil adalah bentuk dorongan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya misalnya seseorang terpaksa untuk memilih calon tertentu karena berada dibawah tekanan Penganut pendekatan ini menjelaskan sikap seseorang sabagai refleksi dari kepribadian seseorang.

Pendekatan psikologis pertama kali dikenalkan oleh ahli ilmu politik dari Universitas Michigan. Pendekatan ini memiliki tiga pusat perhatian yakni sebagai berikut: "(1) persepsi dan penilaian pribadi terhadap kandidat; (2) persepsi dan penilaian pribadi terhadap tema-tema yang diangkat; dan (3) identifikasi partai atau partisanship. Menurut pendekatan ini, yang berpengaruh langsung terhadap pilihan pemilih bukan struktur sosial, sebagaimana dianalisis oleh pendekatan sosiologis (Mazhab Columbia), melainkan faktor-faktor jangka pendek dan jangka panjang terhadap pemilih."²⁶ Penjelasan tersebut menyatakan bahwa dalam konteks perilaku memilihnya, individu cenderung lebih menekankan pada penilaian pribadi terhadap kandidat yang akan dipilihnya. Selain itu, pendekatan psikologis juga

²⁶ Hutomo, R. R. (2015) *Op. Cit*

menekankan mengenai penilaian tema-tema yang dapat merujuk pada visi misi, program atau kebijakan. Dan janji politik yang ditawarkan oleh kadidat maupun partai politik. Pendekatan psikologis juga menekankan bahwa pilihan polotiks seseorang dapat bersifat jangka pendek dan jangka panjang, tergantung pada persepsinya. Sehingga pendekatan psikologis ini lebih bersifat independen bagi pemilih untuk menentukan pilhannya dalam proses pemungutan suara atau pemilihan umum.

Dalam pendekatan psikologis, terdapat beberapa isu khusus yang dapat mempengaruhi terjadinya perilaku pemilih sesorang. Penganut pendekatan ini menjelaskan sikap seseorang sabagai refleksi dari kepribadian seseorang merupakan variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama yakni berupa ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat. ²⁷Isu-isu tersebut terdiri atas tiga isu yang mana meliputi beberpa aspek berikut ini: “(1) isu tersebut dapat ditangkap oleh pemilih; (2) isu tersebut dianggap sebagai hal yang penting oleh pemilih; (3) pemilih dapat menggolongkan atau mengidentifikasi posisinya terhadap isu tersebut, baik positif maupun negatif.” ²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam konteks pendekatan psikologis, isu yang dapat mempegaruhi haruslah

²⁷ Asfar. (2014). *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. Surabaya: Pustaka Utama.

²⁸ *Ibid*

mampu menjadi isu yang membuat tertarik pemilih. Karena dalam hal ini pemilih dapat menilai mana isu yang positif dan negatif, sehingga pemilih dapat menentukan pilihannya secara tepat kedepannya. Karena memang pada dasarnya pendekatan psikologis lebih menekankan pada sikap independen pemilih dalam menentukan sikap politiknya, karena menyangkut pilihan personal bukan dari lingkungan sosialnya.

c. Pendekatan Pilihan Rasional

Penggunaan pendekatan rasional dalam menjelaskan perilaku pemilih oleh ilmuwan politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi. Mereka melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku pemilih (politik). Apabila secara ekonomi masyarakat dapat bertindak secara rasional, yaitu mereka menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dalam perilaku politik pun maka masyarakat akan dapat bertindak secara rasional, yakni memberikan suara ke partai politik yang dianggap mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian.

Pendekatan pilihan rasional dikenalkan oleh Anthony Downs. Pendekatan ini menjelaskan bahwa : “arena pemilihan umum itu seperti sebuah pasar, yang membutuhkan penawaran (partai) dan permintaan (pemilih). Dalam perspektif penawaran dan permintaan ala teori ekonomi, pemilih rasional hanya akan ada jika partai yang akan mereka pilih juga bertindak rasional. Seperti juga pemilih, partai mempunyai

kebutuhan untuk memaksimalkan utilitas mereka, antara lain dari pendapatan pemerintah, kekuasaan, dan gengsi.”²⁹

Berdasarkan pada pandangan tersebut, Partai dan para politisi pada dasarnya adalah pencari kekuasaan, yang tujuannya mendapatkan dukungan suara setidaknya untuk ikut terlibat dalam pemerintahan. Partai yang sedang berkuasa akan memaksimalkan dukungan pemilih agar terpilih kembali, sedangkan partai oposisi bertujuan memaksimalkan dukungan untuk mengganti pemerintah yang ada.

Bagi partai dan para politisi, fungsi sosial, seperti mengelola pemerintahan dengan efektif atau meningkatkan standar hidup warga, adalah akibat atau hasil dari tindakan rasional mereka dan bukan menjadi tujuan mereka. Lebih lanjut, dalam pendekatan pilihan rasional yang menggunakan perspektif dalam teori ekonomi yang menyatakan bahwa seseorang atau individu yang berpikir secara rasional akan tertarik terhadap cara biaya yang paling efektif dalam memaksimalkan apa yang diperoleh. Dalam konteks pemilu, teori ini pada dasarnya menekankan pada motivasi individu untuk memilih atau tidak dan bagaimana memilih berdasarkan kalkulasi mengenai keuntungan yang diakibatkan dari keputusan yang dipilih. Dengan demikian pendekatan ini dapat membentuk sikap pragmatis pemilih.³⁰

Kriteria rasionalitas yang membentuk karakter pemilih dengan pendekatan pilihan rasional sebagaimana beberapa aspek berikut ini:

“(a) Individu dapat membuat sebuah keputusan ketika dihadapkan pada

²⁹ Firmansyah. 2008. *Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

³⁰ *Ibid*

serangkaian alternatif pilihan; (b) Individu dapat menyusun preferensi dirinya dengan pilihan-pilihan yang ada secara berurutan; (c) Susunan preferensi tersebut bersifat transitif atau memilih dengan beragam alternatif; (d) Individu akan selalu memilih alternatif yang ia merasakan paling dekat (utama); dan (e) Jika dihadapkan pada berbagai pilihan di waktu yang berbeda dalam lingkungan yang sama, individu akan membuat keputusan yang sama”.³¹

Kriteria teori pilihan rasional mengasumsikan bahwa individu mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa yang ia inginkan sebagai sebuah outcome, bagaimana pilihan-pilihan tersebut terkait dengan outcome, dan mempunyai seperangkat kriteria yang tetap untuk mengukur alternatif yang berbeda guna menjamin dipilihnya sebuah alternatif setiap waktu. Lebih lanjut, dari segi pemilih, pendekatan pilihan rasional terbagi dalam beberapa kategori yakni sebagai berikut: “(1) pemilih agitator, yang mempunyai informasi dan menggunakannya untuk mempengaruhi pemilih lain untuk memilih dengan cara yang sama dengan dirinya; (2) pemilih pasif, yang menggunakan informasinya untuk dirinya sendiri; (3) pemilih yang belum jelas pilihannya, karena tidak mempunyai informasi yang memadai; (4) pemilih loyalis, yang menggunakan informasi pada pemilu sebelumnya untuk memilih.”³²

Berdasarkan penjelasan di atas, pemilih rasional, dalam tindakan memilihnya ternyata tidak hanya bertindak secara pribadi, namun juga

³¹ Evans, Jocelyn. 2004. *Voters & Voting An Introduction*, London: Sage Publication.

³² Firmansyah. 2008. *Op. Cit*

dapat mempengaruhi orang lain. Hal ini karena atas dasar kepentingan personalnya maka berusaha untuk mempengaruhi pemilih yang lain agar sesuai dengan pilihannya. Di samping itu, juga ada pemilih yang bersifat loyal, karena merasa masih mendapat keuntungan dari pilihan lamanya. Terkait pemberian pilihan atau suara, Downs (dalam Evans, 2008) menekankan batasan mengenai isu yang termasuk dalam konteks kajian pendekatan rasional yang mana lebih mengarah pada isu ekonomi seperti isu pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, dan beberapa isu ekonomi lainnya. Hal ini juga menjadi pertimbangan dari kandidat atau partai politik dalam menentukan strategi kampanye yang digunakan dalam mengikat pemilih rasional yang selalu menekankan aspek ekonomis dalam menentukan pilihannya.

Pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor dimana aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakan tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut, aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai serta keperluan. Pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor.

2.4 Pengertian Politik

Sebagaimana kita ketahui bersama politik terdiri dari orang-orang yang berperilaku dan bertindak politik (*consists of people acting politically*) yang di organisasikan secara politik oleh kelompok-kelompok kepentingan dan

berusaha mencoba mempengaruhi pemerintah untuk mengambil dan melaksanakan suatu kebijakan dan tindakan yang bisa mengangkat kepentingannya dan mengenyampingkan kepentingan kelompok lainnya ³³

Politik sangat identik dengan konflik dalam suatu pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun daerah. Untuk mengendalikan konflik tersebut pemerintah harus bisa memuaskan kebutuhan rakyat yang nantinya bisa menerima dan mendukung kebijakan dan program-program pemerintah. Pemerintah harus mau mendengar, mengamati, dan menyaring melalui tuntutan-tuntutan politik yang secara ajek dituntut oleh berbagai macam kelompok kepentingan. Tuntutan-tuntutan itu bisa berupa selalu melihat salah dan kekurangan pemerintah, mulai dari kesalahan kebijakan yang diambil sampai kepada realisasi kegiatan dan pengawasan.

Kelompok-kelompok kepentingan seperti partai politik dan lain sebagainya menuntut dan bahkan memaksa agar pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan yang sesuai dengan tuntutannya. Jika tuntutan-tuntutan itu tidak dipenuhi, mereka tidak puas dan dari sinilah bibit konflik internal itu dimulai. Dalam masyarakat terdapat tidak hanya satu kelompok saja, melainkan terdapat banyak kelompok, masing-masing mempunyai tradisi, nilai, keyakinan dan kepentingan yang berbeda dengan kelompok lainnya.

Menurut Miftah, masyarakat merupakan suatu kelompok orang-orang yang hidup dalam suatu lingkungan tertentu yang mempunyai tradisi, institusi, aktivitas dan kepentingan bersama. ³⁴Dapat kita lihat pada partai politik yang merupakan organisasi yang berhubungan dengan kekuasaan melalui cara

³³ Miftah Toha. (2007). Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: PT. Raja. Grafindo

³⁴ *Ibid*

pemilihan yang demokratis. Oleh karena itu partai politik bekerja melalui mekanisme perwakilan dalam pemerintahan seperti di lembaga perwakilan rakyat (DPR).³⁵

2.4.1 Pengertian Budaya Politik

Banyak ahli yang memberikan definisi mengenai budaya politik dan tidak ada pengertian yang seragam, tetapi dari pendapat para ahli tersebut terdapat unsur-unsur yang sama. Berikut pendapat para ahli tentang budaya politik, salah satunya Almond dan Verba (dalam buku *The Civic Culture*) menyebutkan bahwa Budaya politik adalah suatu sikap/orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, serta sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Selanjutnya Larry Diamond berpendapat bahwa budaya politik adalah suatu keyakinan, sikap, nilai, ide, sentimen dan evaluasi masyarakat tentang sistem politik nasionalnya serta peran dari masing-masing individu dalam sistem itu. Samuel Beer berikutnya memberikan penjelasan terkait nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.³⁶

2.4.2 Ciri-ciri budaya politik

Ciri – ciri budaya politik dapat diidentifikasi meliputi bahasan tentang:

1. Masalah legitimasi.
2. Pengaturan kekuasaan.
3. Proses pembuatan kebijakan.

³⁵ (Miftah Thoha, 2007), *Op. Cit*

³⁶ Almond, Gabriel A dan Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik (Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara)*. Jakarta: Bumi Aksara.

4. Kegiatan partai politik.
5. Perilaku aparat negara.
6. Gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah.

2.4.3 Faktor Penyebab Perkembangan Politik di Suatu Daerah

Bagaimana sikap dan orientasi warga negara terhadap negaranya sangat dipengaruhi oleh bagaimana orientasi politik warga negara yang bersangkutan. Ada dua tingkatan orientasi politik, yaitu tingkatan masyarakat dan individu. Orientasi masyarakat secara keseluruhan tidak lepas dari orientasi individu. Komponen tersebut meliputi tiga bentuk orientasi, yaitu:

1. Kognitif Yaitu pengetahuan atau pemahaman dan keyakinan individu tentang sistem politik dan atributnya.
2. Afektif Yaitu berkaitan dengan perasaan atau ikatan emosi yang dimiliki individu terhadap sistem politik.
3. Evaluatif Yaitu berkaitan dengan kapasitas individu dalam memberikan penilaian moral terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peran individu didalamnya.

Dalam kondisi nyata, ketiga komponen orientasi tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kemampuan seseorang dalam menilai sistem politiknya akan dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap yang telah dimiliki sebelumnya. Perilaku politik seseorang juga ditentukan dari ketiga orientasi tersebut. Apakah seseorang akan berperan aktif dalam sistem politiknya atau sebaliknya, apakah seseorang berperilaku politik yang bersifat demokratis atau otoriter.

Perkembangan budaya politik pada tingkat daerah lebih didominasi oleh pemikiran dan tingkah laku politik pada budaya politik yang telah matang. Pada tingkat nasional yang lebih menonjol adalah interaksi antar sub budaya politik, di tingkat daerah peranan budaya politik nasional masih sangat kuat. Kenyataan ini mengakibatkan terjadinya peningkatan dan percepatan interaksi antar sub budaya politik, yang dengan sendirinya akan menimbulkan dampak pada proses pembentukan budaya politik nasional.

Perkembangan-perkembangan pada tingkat sub budaya politik menunjukkan bahwa pada umumnya budaya politik daerah telah menerima pengaruh yang besar dari dua faktor dominan yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kedua faktor tersebut adalah sistem kultural (adat istiadat) dan sistem kepercayaan (agama). Oleh sebab itulah sistem kultural masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh luar.

Pertemuan antara adat dan agama telah mematangkan sub budaya politik di Indonesia. Begitu pula halnya proses pematangan budaya politik di Bener Meriah adanya pengakuan atau kesepakatan atas nilai-nilai yang ada dalam masyarakat masing-masing. Dengan demikian, telah mewarnai perkembangan kebanyakan sub budaya politik adalah keserasian antar aspek-aspek budaya politik masyarakat dengan struktur politiknya. Walaupun juga diakui di tingkat daerah sudah pasti bahwa masyarakat Bener Meriah juga dipengaruhi oleh faktor-faktor negatif, yang dapat berakibat negatif seperti konflik.

Dalam manifestasinya, konflik dapat memotivasi munculnya pelanggaran-pelanggaran yang dapat berujung pada pembangkangan-pembangkangan, baik

secara individu maupun kelompok, terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

2.4.4 Karakteristik pemilih

1. Pemilih memilih atas dasar sistim kekerabatan dan paguyuban berdasarkan keturunan (*gemeinschaft by blood*), dan yang menjadi pemuka masyarakat tersebut berasal dari keluarga/kerabat asli, dari orang yang dipandang, terkemuka dari segi sosial ekonomi atau terkemuka karena ketokohnya, sehingga warga masyarakat seringkali menyandarkan diri dan sikapnya terhadap pemuka/tokoh masyarakat tersebut.
2. Agama menjadi pengikat ikatan emosional, asal daerah atau tempat tinggal, ras/suku, budaya, dan status sosial ekonomi, sosial budaya juga menjadi unsur penting dalam ikatan emosional komunitas masyarakat tertentu dalam memberikan hak suaranya.
3. Komunitas masyarakat yang heterogen cenderung lebih bersifat rasional, pragmatis, tidak mudah untuk dipengaruhi, berorientasi ke materi. Sikap dan pandangan untuk memilih atau tidak memilih dalam proses politik lebih besar, sehingga tingkat kesadaran dan partisipasi politiknya ditentukan oleh sikap dan pandangan individu yang bersangkutan, tidak mudah untuk dipengaruhi oleh tokoh atau ikatan primordialisme tertentu.
4. Masyarakat yang kurang pemahamannya di bidang politik, sehingga muncul sikap akan memilih jika mereka diberi materi baik berupa barang maupun uang yang akan berakibat buruk kedepannya (*money*

politic). Dilihat dari karakteristik pemilih tersebut diatas, dapat dipastikan bahwa masyarakat masih sangat kurang pemahamnya dibidang politik khususnya pada saat pemilu dilaksanakan.

Afan Gaffar mengatakan bahwa: ‘Pola perilaku masyarakat pemilih di Indonesia cenderung tidak bersifat rasional dalam arti bahwa para pemilih di Indonesia menentukan pilihannya terhadap partai tertentu bukan semata-mata karena perhitungan rasional tentang manfaat yang akan mereka terima, namun cenderung didasarkan oleh faktor-faktor yang bersifat tradisional dan ikatan-ikatan emosional yang dibangun sebagai akibat internalisasi nilai yang mereka pilih dari suatu generasi ke generasi sebelumnya.³⁷

³⁷ Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi menuju demokrasi, Yogyakarta. Pustaka pelajar. 1999

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan bertempat di Gampong Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Kabupaten Bener Meriah, yang sesuai dengan judul penelitian yang diangkat oleh penulis, yakni menyangkut perilaku politik masyarakat Gampong Rimba Raya dalam menentukan pilihan politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022 di Kabupaten Bener Meriah. Dengan dibantu oleh seorang Keuchik dan Sekretaris Gampong. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Agustus s/d 27 September 2022. Alasan pemilihan tempat penelitian berdasarkan pertimbangan karena masyarakatnya masih ada yang belum betul-betul memahami arti dari pemilukada itu sendiri, kurangnya kepedulian terhadap suara yang akan diberikan serta masih adanya sistem money politik yang dilakukan oleh calon legislatif.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, melalui metode ini penulis mampu mengukur bagaimana perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Metode ini membantu peneliti mendeskripsikan posisi perilaku politik masyarakat yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap Gampong Rimba Raya. Penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan

apa yang terjadi. Kemudian mengangkat permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variabel tersebut”.³⁸

Survei biasanya dilakukan pada sebagian dari populasi atau sampel sehingga biasa disebut sample survei. Akan tetapi survei juga dapat dilakukan pada seluruh anggota populasi. Survei yang tidak menggunakan sampel seperti ini disebut sensus. Data yang dikumpulkan tidak sengaja ditimbulkan oleh peneliti seperti yang dilakukan dalam eksperimen, namun data yang dikumpulkan dalam survei adalah data yang ada dan terdapat dalam kehidupan yang berjalan secara wajar.³⁹ Metode survei yang digunakan adalah melalui penyebaran kuesioner, jenis pertanyaan yang digunakan yaitu pertanyaan tertutup, yaitu jawaban dari pertanyaan tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu, dan responden tidak diberi kesempatan memberikan jawaban lain.

Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat Gampong Rimba Raya yang sudah mempunyai hak pilihnya atau sudah terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang mempunyai pilihan sendiri dalam memilih para kandidat yang didukungnya.

3.3 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey, melalui metode ini penulis mampu mengukur bagaimana perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Metode ini membantu peneliti mendeskripsikan posisi perilaku politik masyarakat yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap Gampong Rimba Raya. Burhan Bungin mengemukakan bahwa “penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk

³⁸ Bungin, Burhan. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Prenadamedia.

³⁹ Soehartono, 2008. Irwan, Metode Penelitian Sosial, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variabel tersebut”.⁴⁰ Survei biasanya dilakukan pada sebagian dari populasi atau sampel sehingga biasa disebut *sample survey*. Akan tetapi survei juga dapat dilakukan pada seluruh anggota populasi. Survei yang tidak menggunakan sampel seperti ini disebut *sensus*. Data yang dikumpulkan tidak sengaja ditimbulkan oleh peneliti seperti yang dilakukan dalam eksperimen, namun data yang dikumpulkan dalam survei adalah data yang ada dan terdapat dalam kehidupan yang berjalan secara wajar.⁴¹

Metode survei yang digunakan adalah melalui penyebaran kuesioner, jenis pertanyaan yang digunakan yaitu pertanyaan tertutup, yaitu jawaban dari pertanyaan tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu, dan responden tidak diberi kesempatan memberikan jawaban lain. Objek penelitian ini adalah masyarakat Gampong Rimba Raya yang sudah mempunyai hak pilihnya atau sudah terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang mempunyai pilihan sendiri dalam memilih para kandidat yang didukungnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Field Research* (Penelitian Lapangan) Peneliti meneliti langsung dilapangan dengan meninjau lokasi yang menjadi tempat penelitian

⁴⁰ Bungin, Burhan. 2005, *Op. Cit*

⁴¹ Soehartono, Irwan, 2008. *Op. Cit*

pada Gampong Rimba Raya di semua dusun yang ada, untuk memperoleh data yang akurat.

2. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) Mencari data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari literatur, artikel, arsip, dan lain-lain yang dianggap relevan dengan penelitian. Tujuan penelitian kepustakaan ini adalah untuk memperoleh data teoritis untuk membangun landasan teori yang kuat guna mendukung penelitian ini.
3. Observasi yaitu suatu prosedur yang berencana yang antara lain meliputi, melihat dan mencatat jumlah dan taraf aktifitas tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti.
4. Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang akan disebarakan kepada para responden yang menjadi sampel penelitian yaitu masyarakat Gampong Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Kabupaten Bener Meriah.
5. Wawancara, yaitu suatu metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data, di mana peneliti mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang sasaran penelitian (responden, atau bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut).⁴²

3.5 Populasi dan Sampel

Pelaksanaan penelitian senantiasa akan selalu berhadapan dengan masalah populasi, sebab suatu pengujian masalah selalu berhubungan dengan sekelompok subjek baik manusia, gejala ataupun peristiwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono mengatakan definisi populasi sebagai berikut: “Populasi adalah

⁴² Notoatmodjo, S. 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴³

Berangkat dari pendapat ahli diatas maka dalam penelitian ini populasi yang digunakan penulis adalah masyarakat Gampong Rimba Raya yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, dengan jumlah populasi 973 orang. Adapun sebaran populasi berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Sebaran Populasi Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki – Laki	492	50,56%
2	Perempuan	481	49,54%
	Jumlah	973	100%

Sumber: KPU Kabupaten Bener Meriah 2017

Menurut Sugiyono, “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”.⁴⁴ Penentuan jumlah sampel diambil berdasarkan rumus perhitungan besaran sampel menurut Burhan Bungin sebagai berikut:⁴⁵

$$n = \frac{N}{N.(d)2 + 1}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel yang dicari

N : Jumlah populasi

⁴³ Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Bungin, Burhan. 2005, *Op. Cit*

d : Nilai presisi ditentukan sebesar 90% atau $a= 0,1$

$$n = \frac{973}{973.(0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{973}{10,73}$$

$$n = 90,68 \text{ (Dibulatkan 90)}$$

Dengan demikian maka dari jumlah populasi 973 diperoleh ukuran sampel sebesar 90,68 dibulatkan 90 sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini diambil secara Random Sampling. Menurut Arikunto merupakan pengambilan sampel oleh peneliti apabila populasi dari mana sampel diambil merupakan populasi homogen yang hanya mengandung satu ciri. Dengan demikian sampel yang dikehendaki dapat diambil secara sembarang (acak) saja.⁴⁶

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data penelitian dilakukan melalui penyusunan diagram pie, dimana setiap kategori diberikan jumlah persentase yang disusun berdasarkan jawaban responden. Selain itu penulis juga menyusun tabel frekuensi untuk menyusun karakter dari masyarakat yang akan dijadikan responden.

3.7 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

⁴⁶ Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Persiapan Penelitian								
2	Pengumpulan data sekunder								
3	Pembuatan Proposal								
4	Seminar Proposal								
5	Perbaikan proposal								
6	Penelitian lapangan								
7	Penulisan Skripsi								
8	Sidang								
9	Penggandaan								

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Gampong Rimba Raya

Gampong Rimba Raya merupakan salah satu Gampong yang berada dalam wilayah Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, dengan batas wilayah yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Sejahtera Raya
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Pulo Intan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Gemasih
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Krueng Peusangan

Menurut hasil observasi yang dilakukan pada Gampong Rimba Raya, terdapat 823 jiwa penduduk terdiri atas laki-laki 389 orang dan perempuan 434 orang, dengan jumlah 225 kepala keluarga.⁴⁷

Rime Raya adalah Kampung Tertua di Kecamatan Timang Gajah, Pada Tahun 2000 Rime Raya di mekarkan menjadi Lima Kampung, Yaitu: Rime Raya, Singah Mulo, Alur Gading, Belang Rakal dan Negeri Antara, Pada saat itu pula di Mekarkanlah Kecamatan Pintu Rime Gayo Dari Kecamatan Timang Gajah Berdasarkan Lima Kampung Tersebut. Pada Tahun 2002 Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Memekarkan lagi Kampung Sebanyak Delapan Belas Kampung Dan saat ini Kecamatan Pintu Rime Gayo Terdiri dari Dua Puluh Tiga Kampung, Kesemuanya itu Induk nya adalah Rime Raya, Pada tahun 2014

⁴⁷ Badan Pusat Statistik [BPS]. 2019. Kabupaten Bener Meriah Dalam Angka 2020: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah.

sesuai dengan RPJM Desa, Kampung Rime Raya di Ubah/ganti kembali ke nama dasarnya yaitu menjadi Rimba Raya di karenakan oleh permasalahan Administrasi pemerintahan dan masyarakat.

4.2 Penyajian Data

4.2.1 Karakteristik Responden

Pada penelitian ini, peneliti memberikan kuesioner kepada responden yang tersebar pada masyarakat Gampong Rimba Raya, dengan menemukan data sebagai berikut:

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	21 – 40 Tahun	60	66%
2	41 – 60 Tahun	30	34%
3	> 61 Tahun	0	0%
Jumlah		90	100%

Sumber : Data Primer Diolah 2021

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa dari 90 responden yang persentase terbanyak adalah dari usia 21-40 tahun dengan jumlah persentase 60%, dan persentase terkecil adalah masyarakat yang usianya di atas 60 tahun menjadi subjek penelitian didapatkan distribusi frekuensi berdasarkan usia pada kategori dewasa awal sebanyak 60 orang (66%), kategori dewasa tengah 30 orang (34%), sedangkan kategori dewasa akhir tidak diambil sebagai responden, karena masyarakat yang berusia 60 tahun keatas dianggap terlalu dewasa sehingga tidak

dapat memberikan jawaban dengan baik (tidak memahami pertanyaan yang diajukan).

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki – Laki	45	50%
2	Perempuan	45	50%
Jumlah		90	100%

Sumber : Data Primer Diolah 2021

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 90 responden, yang menjadi subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin adalah, responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 50 orang atau 50% dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 45 orang atau 50%.

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Tidak / Belum Bekerja	19	21,1%
2	Petani	24	26,6%
3	Pedagang	14	15,5%
4	PNS	16	17,7%
5	Mahasiswa	17	18,8%
Jumlah		90	100%

Sumber : Data Primer Diolah 2021

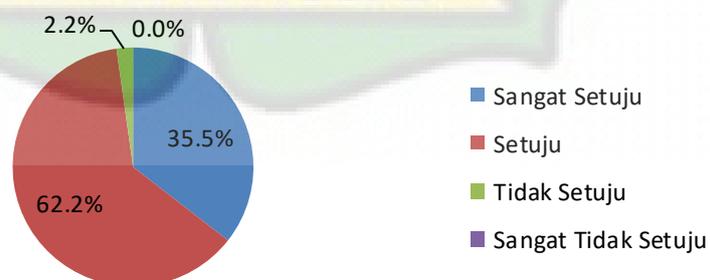
Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa dari 90 responden yang menjadi subjek penelitian didapatkan distribusi responden berdasarkan pekerjaannya yaitu, masyarakat yang berstatus mahasiswa sebanyak 17 orang atau (18,8%), yang berstatus PNS sebanyak 16 orang atau (17,7%), pedagang sebanyak 14 orang (15,5%), Petani 24 orang atau (26,6%), dan tidak bekerja sebanyak 19 orang atau (21,1%). Jadi, yang diambil sebagai responden terbanyak jika dilihat dari segi pekerjaan, yaitu masyarakat yang bekerja sebagai petani, dan yang paling sedikit bekerja sebagai pedagang.

4.2.2 Tanggapan Responden

Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuesioner, jumlah pertanyaan sebanyak 16 butir yang terbagi dalam variabel faktor pengaruh (X) sebanyak 5 butir dan variabel perilaku (Y) sebanyak 8 butir. Selanjutnya akan diuraikan pula hasil kuesioner dari para responden yang memberikan pendapat terhadap variabel yang diteliti sebagai berikut:

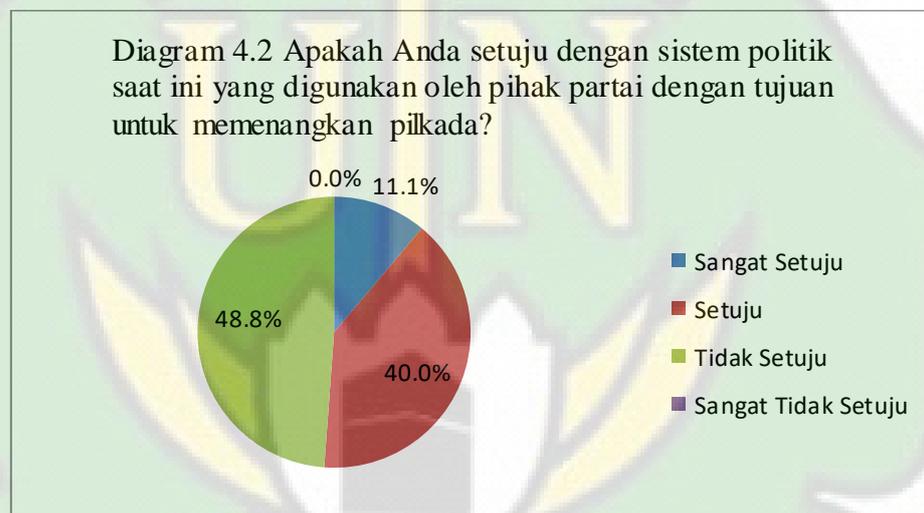
1. Variabel Perilaku Politik (X)

Diagram 4.1 Masyarakat Gampong Rimba Raya diberikan kebebasan dalam memilih pada pilkada 2017 lalu (otonom: karena keinginan sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun)



Berdasarkan diagram 4.1 dapat dilihat bahwa dari 90 responden yang sangat setuju terhadap kebebasan masyarakat dalam memilih sebanyak 32 orang atau 35,5%, setuju sebanyak 56 orang atau 62,2%, tidak setuju sebanyak 2 orang atau 2,2%, dan sangat tidak setuju sebanyak 0 orang atau 0,0%.

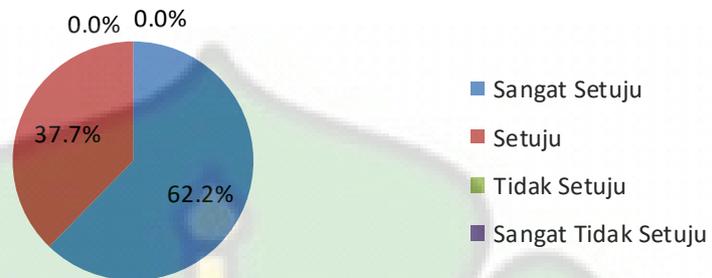
Berdasarkan hasil dari Diagram 4.1 dapat disimpulkan bahwa masyarakat Gampong Rimba Raya telah diberikan kebebasan dalam memilih pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 silam.



Berdasarkan diagram 4.2 dapat dilihat bahwa dari 90 responden yang sangat setuju terhadap system politik saat ini sebanyak 10 orang atau 11,1%, setuju sebanyak 36 orang atau 40%, tidak setuju sebanyak 44 orang atau 48,8%, dan sangat tidak setuju sebanyak 0 orang atau 0,0%.

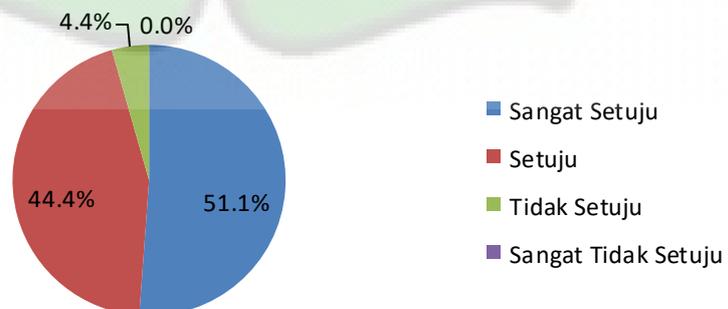
Berdasarkan data yang diperoleh diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Gampong Rimba Raya sebagian besar setuju dengan system politik yang diterapkan saat ini yaitu 51,1% dan sebagian lainnya tidak setuju dengan system politik yang diterapkan yaitu 48,8%.

Diagram 4.3 Masyarakat memiliki persepsi dan pengetahuan masing-masing terhadap calon Bupati dan Wakilnya sehingga memberikan suara mereka pada saat pilkada berlangsung

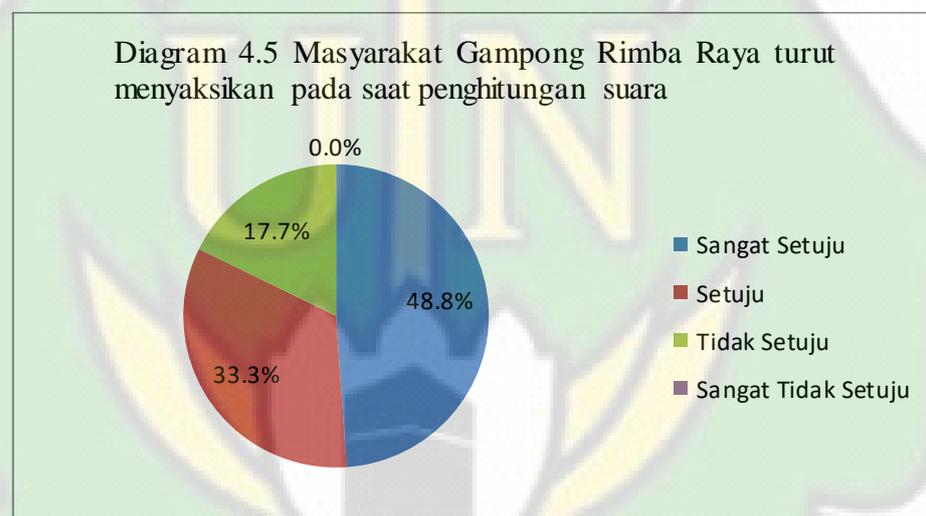


Berdasarkan diagram 4.3 dapat dilihat bahwa dari 90 responden yang sangat setuju terhadap persepsi dan pengetahuan masyarakat terhadap calon Bupati dan Wakilnya mampu mempengaruhi masyarakat sehingga memberikan suaranya sebanyak 56 orang atau 62,2%, setuju sebanyak 34 orang atau 37,7%, tidak setuju sebanyak 0 orang atau 0,0%, dan sangat tidak setuju sebanyak 0 orang atau 0,0%. Jadi, masyarakat Gampong Rimba Raya memiliki persepsi dan pengetahuan terhadap calon Bupati dan Wakilnya mampu mempengaruhi masyarakat.

Diagram 4.4 Apakah anda percaya bahwa calon Bupati dan Wakil bupati yang anda pilih mampu membawa Kabupaten Bener Meriah kearah yang lebih baik?



Berdasarkan diagram 4.4 dapat dilihat bahwa dari 90 responden yang sangat percaya terhadap calon bupati dan calon wakil bupati sebanyak 46 orang atau 51,1%, setuju sebanyak 40 orang atau 44,4%, tidak setuju sebanyak 4 orang atau 4,4%, dan sangat tidak setuju sebanyak 0 orang atau 0,0%. Jadi, masyarakat Gampong Rimba Raya percaya dengan calon bupati dan calon wakil bupati pilihannya mampu membawa kabupaten bener meriah ke arah lebih baik.

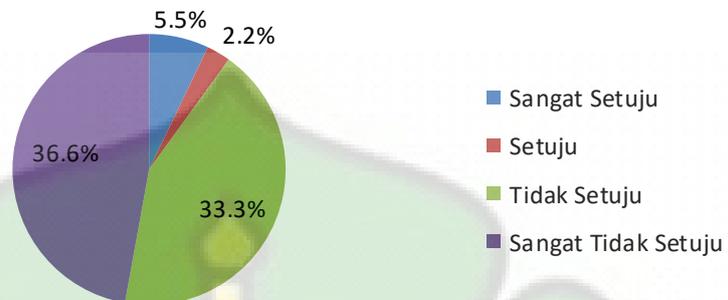


Berdasarkan diagram 4.5 dapat dilihat bahwa dari 90 responden yang sangat setuju terhadap keikutsertaan masyarakat pada saat perhitungan suara sebanyak 44 orang atau 48,8%, setuju sebanyak 30 orang atau 33,3%, tidak setuju sebanyak 16 orang atau 17,7%, dan sangat tidak setuju sebanyak 0 orang atau 0,0%.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Gampong Rimba Raya ikut menyaksikan penghitungan suara pada TPS-TPS di desa mereka masing-masing.

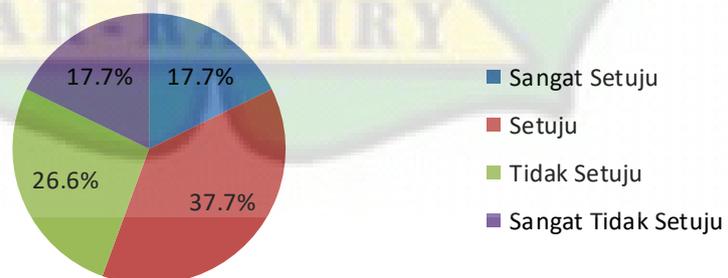
2. Variabel Perilaku Politik (X)

Diagram 4.6 Anda menentukan pilihan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan pemberian dari calon Bupati baik berupa sembako, barang dan jabatan.

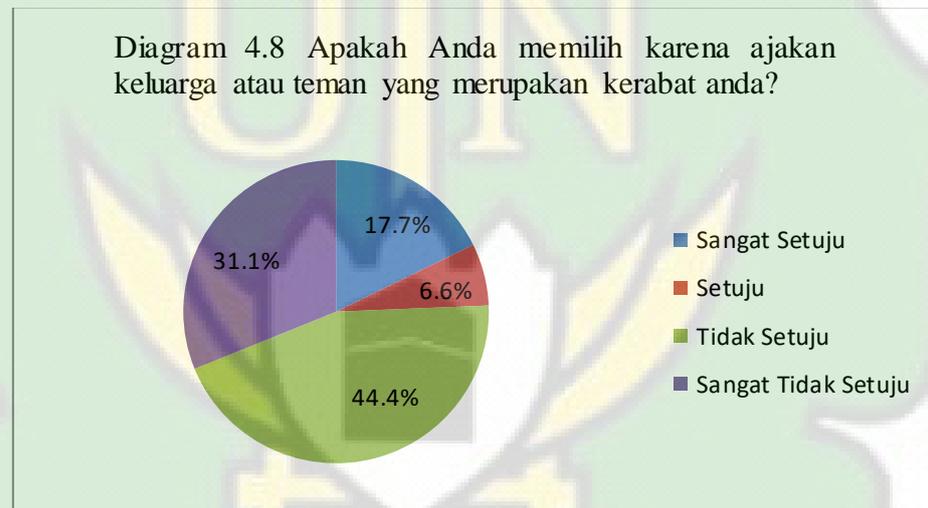


Berdasarkan diagram 4.6 dapat dilihat bahwa dari 90 responden yang sangat setuju terhadap pernyataan no 1 sebanyak 12 orang atau 13,3%, setuju sebanyak 0 orang atau 0,0%, tidak setuju sebanyak 36 orang atau 40%, dan sangat tidak setuju sebanyak 42 orang atau 46,6%. Jadi, masyarakat Gampong Rimba sebagian besar memilih karena kriteria calon bupati dan wakil bupati tersebut memang layak, bukan karena iming – iming sembako dll.

Diagram 4.7 Kesamaan etnis, agama dan hubungan kekerabatan dengan calon menjadi pertimbangan Anda dalam memilih calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut

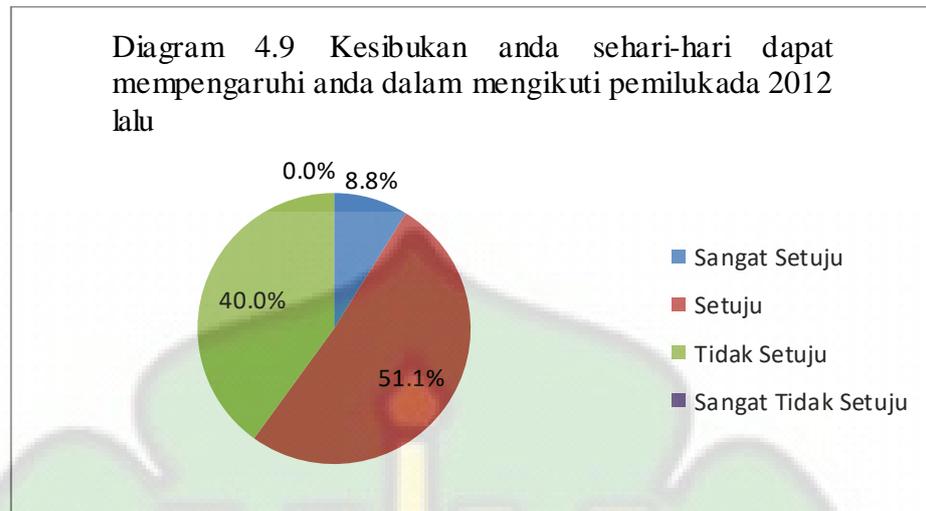


Berdasarkan diagram 4.1 dapat dilihat bahwa dari 90 responden yang sangat setuju terhadap pernyataan nomer 02 sebanyak 16 orang atau 17,7%, setuju sebanyak 34 orang atau 37,7%, tidak setuju sebanyak 24 orang atau 26,6%, dan sangat tidak setuju sebanyak 16 orang atau 17,7%. Jadi, masyarakat Gampong Rimba Raya memiliki pendapat yang bervariasi terhadap kesamaan etnis, agama dan hubungan kekerabatan dengan calon bupati dan wakil bupati, berdasarkan diagram 4.7 dapat dilihat bahwa masyarakat yang setuju dengan tidak setuju berbanding sama.



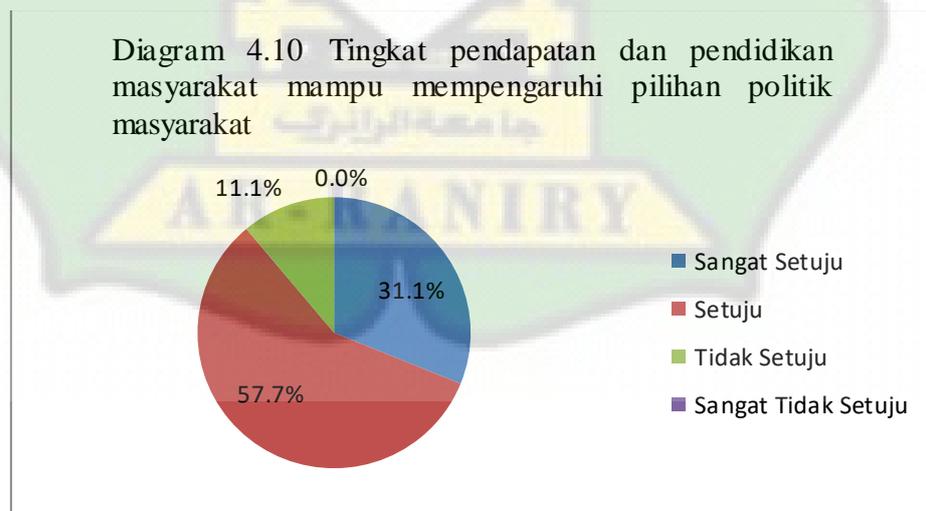
Berdasarkan diagram 4.8 dapat dilihat bahwa dari 90 responden yang sangat setuju terhadap masyarakat yang memilih karena ajakan keluarga dan kerabat sebanyak 16 orang atau 17,7%, setuju sebanyak 6 orang atau 6,6%, tidak setuju sebanyak 40 orang atau 44,4%, dan sangat tidak setuju sebanyak 28 orang atau 31,1%. Jadi, masyarakat Gampong Rimba Raya telah diberikan kebebasan dalam memilih pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 silam.

Diagram 4.9 Kesibukan anda sehari-hari dapat mempengaruhi anda dalam mengikuti pemilukada 2012 lalu



Berdasarkan diagram 4.9 dapat dilihat bahwa dari 90 responden yang sangat setuju terhadap pernyataan nomer 04 sebanyak 8 orang atau 8,8%, setuju sebanyak 46 orang atau 51,1%, tidak setuju sebanyak 36 orang atau 40%, dan sangat tidak setuju sebanyak 0 orang atau 0,0%. Jadi, masyarakat Gampong Rimba Raya sebagian besar setuju bahwa kesibukan sehari – hari dapat berpengaruh terhadap pemilukada.

Diagram 4.10 Tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat mampu mempengaruhi pilihan politik masyarakat



Berdasarkan diagram 4.10 dapat dilihat bahwa dari 90 responden yang sangat setuju terhadap pernyataan nomer 05 sebanyak 28 orang atau 31,1%, setuju sebanyak 52 orang atau 57,7%, tidak setuju sebanyak 10 orang atau 11,1%, dan sangat tidak setuju sebanyak 0 orang atau 0.0%. Jadi, masyarakat Gampong Rimba Raya sebagian besar menyatakan bahwa tingkat pendapatan dan pendidikan dapat mempengaruhi pilihan politik masyarakat.

4.3 Hasil Pilkada Kabupaten Bener Meriah

4.3.1 Nama – Nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Periode 2017 – 2022

Berikut nama-nama calon Bupati dan calon Wakil Bupati Bener Meriah periode 2017-2022.

Tabel 4.4

Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Periode 2017-2022

No	Nama Calon	Nomor Urut
1	Ir. H. Ridwan AM.,MT – Riduansyah	01
2	H. Misrady MS – Nasruddin	02
3	Ahmadi.,SE – Sarkawi	03
4	Armada Saleh – Karmijan IR	04
5	Rusli M. Saleh – Drs. T. Islah.,M.Si	05
6	Ridwan Qari – Suterisno	06
7	Muchlis Gayo – Ir. M. Ali	07

Sumber: KIP Bener Meriah

4.3.2 Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Periode 2017 – 2022

Hasil perolehan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Bener Meriah periode 2017 – 2022 dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.5

Rekapitulasi hasil perhitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah
Periode 2017-2022 Gampong Rimba Raya

No	Nama Calon	Jumlah Suara	Persentase
1	Ir. H. Ridwan AM.,MT – Riduansyah	133	19,59%
2	H. Misrady MS – Nasruddin	12	1,77%
3	Ahmadi.,SE – Sarkawi	300	44,18%
4	Armada Saleh – Karmijan IR	17	2,50%
5	Rusli M. Saleh – Drs. T. Islah.,M.Si	145	21,5%
6	Ridwan Qari – Suterisno	30	4,42%
7	Muchlis Gayo – Ir. M. Ali	42	6,19%
Jumlah		679	100%

Sumber: KIP Bener Meriah

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa, pada tingkat Desa di Gampong Rimba Raya diperoleh hasil yaitu pasangan Ahmadi.,SE – Sarkawi dengan no. urut 3 mendapatkan perolehan suara terbanyak yaitu 300 suara atau 44,18%. Pada posisi kedua tertinggi diduduki oleh pasangan Rusli M. Saleh – Drs. T. Islah.,M.Si dengan no. urut 5 dengan perolehan suara sebanyak 145 suara atau 21,35%. Pada posisi ketiga diduduki oleh pasangan Ir. H. Ridwan AM.,MT – Riduansyah

dengan perolehan suara sebanyak 133 suara atau 19,59%. Dengan jumlah suara tidak sah sebanyak 28 suara atau 3,9%.

Tabel 4.6

Rekapitulasi hasil perhitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah
Periode 2017-2022

No	Nama Calon	Jumlah Suara	Persentase
1	Ir. H. Ridwan AM.,MT – Riduansyah	14.804	18,97%
2	H. Misrady MS – Nasruddin	4.964	6,36%
3	Ahmadi.,SE – Sarkawi	29.554	37,88%
4	Armada Saleh – Karmijan IR	1.447	1,85%
5	Rusli M. Saleh – Drs. T. Islah.,M.Si	17.736	22,73%
6	Ridwan Qari – Suterisno	6.916	8,86%
7	Muchlis Gayo – Ir. M. Ali	2.599	3,33%
Jumlah		78.020	100%

Sumber: KIP Bener Meriah

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa, hasil perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah yaitu pasangan Ahmadi.,SE – Sarkawi dengan no. urut 3 mendapatkan perolehan suara terbanyak yaitu 29.554 suara atau 37,88%. Pada posisi kedua tertinggi diduduki oleh pasangan Rusli M. Saleh – Drs. T. Islah.,M.Si dengan no. urut 5 dengan perolehan suara sebanyak 17.736 suara atau 22,73%. Pada posisi ketiga diduduki oleh pasangan Ir. H. Ridwan AM.,MT – Riduansyah dengan perolehan suara sebanyak

14.808 suara atau 18,97%. Dengan jumlah suara tidak sah sebanyak 288 suara atau 4,11%.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Perilaku Politik Masyarakat Gampong Rimba Raya

Perilaku politik (*Politic Behaviour*) adalah perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai masyarakat politik. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik. Salah satunya adalah pada saat memberikan hak suara mereka pada pemilu yang berlangsung di daerahnya.

Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sedangkan sikap politik adalah merupakan hubungan atau pertalian diantara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu obyek atau situasi politik dengan cara tertentu.

Sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh proses dan peristiwa historis masa lalu dan merupakan kesinambungan yang dinamis. Peristiwa atau kejadian politik secara umum maupun yang menimpa pada individu atau kelompok masyarakat, baik yang menyangkut sistem politik atau ketidak stabilan politik, janji politik dari calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang tidak pernah ditepati dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat.

Sumber perilaku politik pada dasarnya adalah budaya politik, yaitu kesepakatan antara pelaku politik tentang apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kesepakatan ini tidak selalu bersifat terbuka, tetapi ada pula yang bersifat tertutup. Kesepakatan untuk menerima amplop setiap kali dilakukan kampanye maupun rapat partai politik merupakan kesepakatan gelap. Membayar "uang pelicin" kepada para petinggi politik untuk mendapatkan dukungan partai dalam rebutan jabatan bupati, wali kota, dan gubernur merupakan tindakan yang dianggap sah dalam budaya politik kita kini.

Ada banyak alasan yang mendorong masyarakat Gampong Rimba Raya untuk ikut berpartisipasi pada pemilukada 2017 silam. Beberapa di antaranya yaitu karena keikutsertaan dalam pemilukada adalah merupakan kewajiban/hak sebagai Warga Negara, bila tidak ikut dalam pilkada mereka takut adanya sanksi hukum, sebab nama mereka telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), meskipun sebenarnya mereka tidak menganggap penting hal tersebut. Mereka juga memaknai pemilukada merupakan salah satu cara bagi pemilih untuk tetap ikut berpartisipasi sebagai wujud masyarakat yang patuh terhadap peraturan pemerintah tanpa harus terbebani oleh harapan-harapan politik. Hal ini diungkapkan oleh beberapa responden, bahwa mereka tidak memikirkan hasil ketika hendak menggunakan hak suaranya. Artinya siapapun yang keluar jadi pemenang dalam Pemilukada tersebut tidak menjadi pikiran bagi pemilih.

Jika dilihat dari segi sistem politik yang dipakai sekarang ini, di gampong Rimba Raya setidaknya 51% masyarakat menyetujui hal tersebut, 51% masyarakat tersebut merasa para kepala daerah menepati janji kampanyenya, sedangkan 49% lainnya berpendapat bahwa setiap diadakannya pemilihan kepala

daerah maupun pemilihan lainnya, para calon hanya mampu berjanji tanpa memberi bukti, sehingga masyarakat memiliki pandangan atau persepsi masing-masing terhadap calon dan persepsi berpengaruh terhadap perilaku politik masyarakat ke depannya.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku politik masyarakat Gampong Rimba Raya masih dipengaruhi berstatus *fifty-fifty* ada yang terpengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, ada pula yang tidak. Pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Periode 2017- 2022 lalu, masih terdapat banyak surat suara yang tidak sah. Pada tingkat Kecamatan Pintu Rime Gayo diperoleh sebanyak 288 suara tidak sah dan pada tingkat Gampong Rimba Raya diperoleh sebanyak 28 suara yang tidak sah. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada sebagian dari masyarakat yang belum betul-betul memahami bagaimana proses pencoblosan yang benar, sehingga masih terdapat surat suara yang rusak.

4.4.2 Hal Yang Mempengaruhi Perilaku Politik Masyarakat Gampong Rimba Raya

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat Gampong Rimba Raya yaitu:

1. Lingkungan Sosial Politik Tak Langsung

Faktor lingkungan politik tak langsung mampu mempengaruhi sikap masyarakat sebanyak 51% seperti pada sistem politik yang digunakan oleh partai politik untuk memenangkan pemilihan kepala daerah, masyarakat memberikan penilaian tersendiri. Selain itu dari segi ekonomi dan media massa yang memberikan berbagai macam informasi

mengenai parpol dan figur calon juga mampu menjadi pertimbangan masyarakat Gampong Rimba Raya dalam memberikan pilihan politik.

2. Lingkungan Sosial politik Langsung

Lingkungan sosial politik masyarakat secara langsung memberikan pengaruh pada sikap politik masyarakat sebanyak 54%, baik negatif maupun positif. Pengaruh tersebut bisa datang dari keluarga sendiri, agama, dan kelompok-kelompok tertentu, bahkan dari pihak partai pun mampu memberikan pengaruh besar terhadap sikap yang akan mereka tunjukkan. Seperti pada saat calon kepala daerah melakukan kampanye atau pendekatan pada masyarakat, calon secara langsung memberikan banyak bantuan dengan berbagai macam bentuknya, untuk menarik simpatik masyarakat. Dalam hal ini responden menganggap pemberian-pemberian calon selama masa kampanye, baik berupa bantuan sosial terhadap individu atau kelompok, rumah ibadah dan lain sebagainya, bagi responden dimaknai sebagai kebaikan, bahkan responden menilai bahwa calon yang baik menurut mereka adalah calon yang bukan hanya mampu berjanji, tapi juga mampu memberi.

3. Kepribadian Individu

Kepribadian individu merupakan salah satu faktor pengaruh dan diperoleh hasil persentase sebesar 95%, karena setiap individu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Ada yang sadar akan hak mereka dalam memilih merupakan aspirasi masyarakat yang akan mampu memberikan perubahan pada daerahnya. Namun ada juga sebagian

masyarakat yang tidak peduli akan hal tersebut, sehingga akan berdampak buruk untuk negara dan daerah mereka sendiri.

4. Keadaan Lingkungan

Keadaan lingkungan yang dimaksud disini yaitu keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi ikut atau tidaknya responden dalam memberikan hak suaranya, yang disebabkan karena cuaca, keadaan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan, kesehatan dan lain sebagainya. Faktor ini memiliki persentase sebesar 59%.

5. Faktor Sosial Ekonomi

Masyarakat Gampong Rimba Raya terdiri dari keluarga yang memiliki pendapatan tinggi, sedang, dan rendah. Hal tersebut mampu memberikan pengaruh bagi responden. Dari tingkat pendidikan salah satunya, mereka yang berpendidikan tinggi mampu berfikir sebelum bertindak, berfikir dalam hal mampu atau tidaknya calon memberikan perubahan kedepan, sedangkan mereka yang berpendidikan rendah, mereka hanya langsung bertindak tanpa mampu berfikir. Pada faktor ekonomi besaran pengaruh yang diperoleh sebesar 88%.

6. Budaya Politik

Budaya politik merupakan faktor yang paling tidak berpengaruh yakni sebesar 70% masyarakat Rimba Raya tidak setuju dengan statement bahwa mereka memilih calon nya karena ining – ining sembako dan lainnya, karena dari sistem politik yang dijalankan oleh para politikus yang selalu akan melakukan apapun demi mewujudkan keinginannya dalam mendapatkan kursi di pemerintahan. Sistem politik

yang dijalankan pun bermacam-macam, dari yang bersifat positif sampai yang negatif. Masyarakat pun tidak terpengaruh lagi dengan janji-janji dan berbagai macam pemberian calon selama kampanye yang mampu menarik masyarakat untuk memilih calon.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

1. Perilaku Politik Masyarakat Gampong Rimba Raya melalui sikap dan perilaku masyarakat dibidang politik masih dapat dilihat melalui keikutsertaan masyarakat pada saat pemilihan serta pandangan masyarakat terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati. Perilaku masyarakat yang demikian masih berdampak positif, mereka memiliki keinginan untuk lebih mengenal calon yang akan mereka pilih nantinya pada saat hari pencoblosan, agar tidak salah pilih nantinya. Namun adapula masyarakat yang kurang mempercayai calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri, mereka menganggap calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan terpilih tidak akan sesuai dengan keinginan mereka. Masyarakat hanya dijadikan alat untuk mendapatkan jabatan yang mereka inginkan. Seperti yang telah terjadi pada tahun-tahun yang lalu.
2. Pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022, masyarakat masih mempertimbangkan hal-hal yang menurut mereka sangat penting untuk diperhatikan seperti visi dan misi dan figur calon Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah serta sistem politik yang dipakai. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui

sebanyak 56% perilaku politik masyarakat masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

3. Hal-hal Yang Mempengaruhi Perilaku Politik Masyarakat Adapula faktor penting yang menentukan perilaku politik masyarakat dalam menentukan pilihan politik adalah kesan pribadi pemilih terhadap calon, visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati, hubungan kekerabatan dengan calon, faktor lingkungan politik baik secara langsung maupun tidak langsung, ekonomi dan budaya politik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan beberapa saran yang dapat digunakan untuk pemerintah dan juga penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Desa diharapkan dapat memberikan suasana yang kondusif bagi masyarakat hingga masyarakat dapat dengan bebas menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani.
2. Bagi Masyarakat diharapkan sebagai warga negara yang baik senantiasa ikut berpartisipasi dengan niat yang baik demi mewujudkan negara yang demokrasi dalam pemilihan Kepala Daerah bahkan Pemilihan Presiden dan pemilihan yang lainnya.
3. Bagi Elit Politik hendaknya dalam mengikuti pemilihan pada pemilukada lebih bersikap sportif dalam bersaing, dan diikuti pula dengan niat yang baik. Bukan hanya untuk mendapatkan jabatan saja yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu, namun diharapkan lebih kepada tujuan untuk memajukan daerah yang akan dipimpinya kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. Cet.ke-1.
Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, PT
Rieneka Cipta, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2007. Manajemen Penelitian, PT. Rieneka Cipta, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam. Demokrasi Di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen Dan
Demokrasi Pancasila. Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 1994.
- Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2008. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Kencana Prenada media
Group. Jakarta.
- Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif. Ed. ke-2. Jakarta: Prenada Media Group,
2007.
- Gaffar, Afan, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta,
Cetakan V, PustakaPelajar, 2005.
- Hidayat, 2002. Penelitian dan Penilaian kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten
Suka bumi, Thesis UGM, 2001. Yogyakarta.
- Kriyantono, Rachmat, 2007. Public Relations Writing Media Public Relation
Membangun Citra Korporate, Kencana Prenada Media Groub, Jakarta.
- Kushartono, Toto, 2006, Perilaku Pemilih di Kabupaten Suka bumi (Studi Kasus
Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Suka bumi
secara Langsung Tahun 2005 di Kecamatan pelabuhan ratu, citsaat dan

- jampang kulon Kabupaten Suka bumi, Thesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Marijan, Kacung. 2010. Sistem Politik Indonesia (konsolidasi demokrasi pascaorde baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nadir, Ahmad. 2005. Pilkada Langsung dan masa depan Demokrasi, Averroes press, Malang
- Nazir, Moh. 2003. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. Pengembangan Sumber Daya Manusia. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Putra, Fadillah, 2003, Perkembangan Politik Indonesia, Bina Cipta, Bandung.
- Riduwan, 2010, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Alfabeta, Bandung.
- Soedjatmoko, 2001. Realita culture sejak zaman kolonial sampai saat ini, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soehartono, Irawan. 2008. Metode penelitian Sosial. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Supartono, 2001. Model-model kebudayaan, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, 2010
- Sugiyono, Arif, 2005, Faktor yang Mempengaruhi Pemilih dalam pemilihan kepala daerah langsung: perspektif Political Marketing, Majalah Usahawan, No.5, Th.XXXIV, Mei 2005, Jakarta
- Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung
- Thoha, Miftah, 2007, Birokrasi dan Politik di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Upe, Ambo. 2008. Sosiologi politik kontemporer, Prestasi Pustaka karya, Jakarta

Amandemen Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2008, Sinar Grafika, Jakarta.

Rekapitulasi Hasil Pilkada Kabupaten Bener Meriah 2017.



KUESIONER

Variabel Perilaku Politik

1. Masyarakat Gampong Rimba Raya diberikan kebebasan dalam memilih pada pilkada 2017 (tidak ada tekanan dari pihak manapun).
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak Setuju
 - d. Sangat Tidak Setuju
2. Apakah Anda setuju dengan sistem politik saat ini yang digunakan oleh pihak partai dengan tujuan untuk memenangkan pilkada?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak Setuju
 - d. Sangat Tidak Setuju
3. Masyarakat memiliki persepsi dan pengetahuan masing-masing terhadap calon Bupati dan Wakilnya sehingga memberikan suara mereka pada saat pilkada berlangsung.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak Setuju
 - d. Sangat Tidak Setuju
4. Apakah anda percaya bahwa calon Bupati dan Wakil bupati yang anda pilih mampu membawa Kabupaten Bener Meriah kearah yang lebih baik?

- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak Setuju
 - d. Sangat Tidak Setuju
5. Masyarakat Gampong Rimba Raya turut menyaksikan pada saat penghitungan suara
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak Setuju
 - d. Sangat Tidak Setuju

Variabel pilihan politik

1. Anda menentukan pilihan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan pemberian dari calon Bupati baik berupa sembako, barang dan jabatan.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak Setuju
 - d. Sangat Tidak Setuju
2. Kesamaan etnis, agama dan hubungan kekerabatan dengan calon menjadi pertimbangan Anda dalam memilih calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak Setuju
 - d. Sangat Tidak Setuju

3. Memilih karena ajakan keluarga atau teman yang merupakan kerabat anda
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak Setuju
 - d. Sangat Tidak Setuju
4. Kesibukan anda sehari-hari dapat mempengaruhi anda dalam mengikuti pemilu pada 2017 lalu?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak Setuju
 - d. Sangat Tidak Setuju
5. Tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat mampu mempengaruhi pilihan politik masyarakat.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak Setuju
 - d. Sangat Tidak Setuju

